

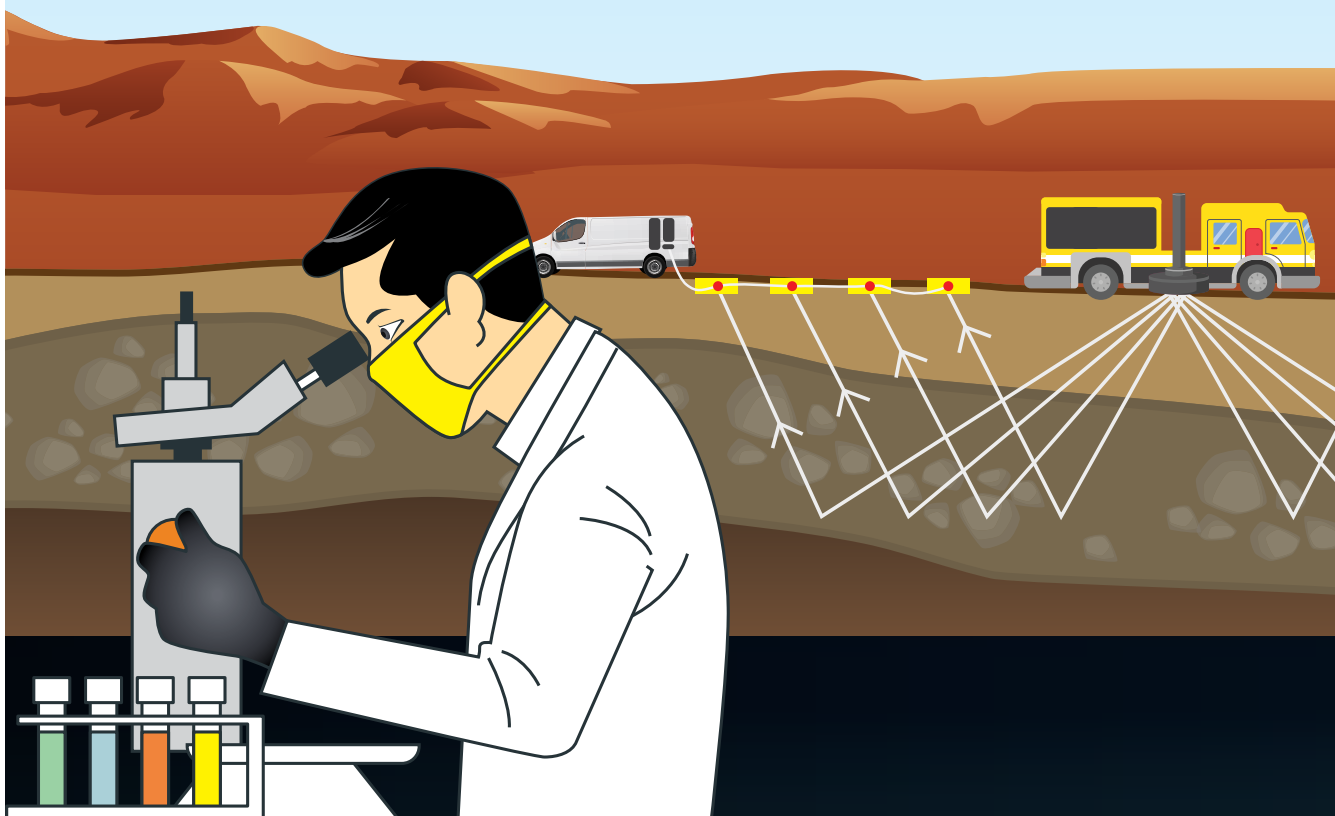


DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

JURNAL MIGAS

Issue 06 Juli-Desember 2020

Geliat Mencari SUMBER MIGAS BARU



SAJIAN UTAMA

Fleksibilitas Investasi Migas
Demi Tingkatkan Minat
Investor

SOROT

Memacu *Lifting* Migas
Efektif dan Efisiensi
Biaya Operasi

NEWS

Tutuka Ariadji
Resmi Duduki Jabatan
Dirjen Migas Baru



Geliat Mencari Sumber Migas Baru

JURNAL MIGAS
Issue 06 Juli-Desember 2020



Tahun 2020 merupakan tahun yang mungkin tidak mudah dilupakan oleh banyak orang. Alasannya apalagi kalau bukan pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah berdampak ke banyak sektor. Sayangnya, dampak tersebut mayoritas negatif.

Subsektor migas pun tak luput dari eksekusi negatif pandemi Covid-19. Sebagian besar Badan Usaha di subsektor ini harus merevisi target atau tujuannya sepanjang tahun 2020. Sebagai regulator, Kementerian ESDM, khususnya Ditjen Migas, pun harus beradaptasi terhadap kondisi baru yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19.

Meski pandemi Covid-19 'memukul' telak banyak subsektor, bukan berarti kita harus pasrah terhadap keadaan yang ada. Terus berupaya di periode sulit seperti saat ini merupakan cara untuk mempersiapkan diri terhadap kondisi di masa depan. Optimisme akan kondisi yang lebih baik ke depannya harus terus berkobar.

Berbagai upaya Ditjen Migas dan *stakeholder* terkait dalam merespon kondisi saat ini dapat dilihat dari ulasan-ulasan di edisi kali ini, seperti pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas), konverter kit (konkit) untuk nelayan serta petani sasaran, eksplorasi, investasi dan lain-lain. Tak kalah penting, Ditjen Migas akan terus berupaya mewujudkan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Semoga berbagai ulasan tersebut bermanfaat bagi kita semua. Selamat membaca.



48

>> NEWS

Tutuka Ariadji Resmi Duduki Jabatan Dirjen Migas Baru

Prof. Ir. Tutuka Ariadji, M.Sc., Ph.D., IPU resmi menduduki jabatan Dirjen Migas baru. Ia mengisi kursi jabatan tersebut setelah lebih dari setahun kosong dan diisi oleh pelaksana tugas (Ptt).

12

>> SAJIAN UTAMA

Fleksibilitas Investasi Migas Demi Tingkatkan Minat Investor

Industri hulu migas dunia saat ini sedang mengalami tantangan hebat. Pandemi Covid-19 telah membuat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) melemah. Harga minyak pun ikut tererosok. Imbasnya, investasi hulu migas dunia turun hingga US\$125 miliar. Bagaimana di Indonesia?

JURNAL MIGAS

Issue 06 Juli-Desember 2020

DITERBITKAN OLEH

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
ISSN 2528-4169

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab **Sekretaris Direktorat Jenderal Migas**
Redaktur **Mohammad Alfansyah**
Editor/ Penyunting **Akhmad Fauzi Budiman, Rizky Amalia Wismashanti**
Desain Grafis dan Fotografer **Agustiawan Mendrofa, Krisna Dinda Bestari**
Sekretariat **Sinta Raesanti, Kabul Priyono,**
Kontributor **Tursilowulan Wahyu, Dian Apriani**

4

JURNAL MIGAS

6 SAJIAN UTAMA

Geliat Mencari Sumber Migas Baru

10 Memacu *Lifting* Migas Efektif dan Efisiensi Biaya Operasi

12 Fleksibilitas Investasi Migas Demi Tingkatkan Minat Investor

16 SOROT
Mendorong Gasifikasi Batu Bara Guna Menekan Impor LPG

19 Di Tengah Pandemi Covid-19, Pembangunan Jargas Tetap Berlanjut

22 BERANDA
Berdampak Nyata, Paket Perdana Konversi BBM ke BPG untuk Petani Sasaran Tahun Depan Bertambah

6

>> SAJIAN UTAMA

Geliat Mencari Sumber Migas Baru

Kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia turut terdampak pandemi Covid-19. Namun, hal tersebut tak lantas menyurutkan tekad untuk mencari sumber migas baru. Pemerintah tetap berkomitmen melakukan eksplorasi migas.

26 Lima Tahun Berjalan, 60.859 Nelayan Sasaran Nikmati Paket Konversi BBM ke BPG

30 PERUBAHAN
Tanpa Kompromi, Ditjen Migas Berkomitmen Penuh Tegakan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

33 Motivasi: Tidak Akan Ada Pertumbuhan Tanpa Inovasi

34 Agen Perubahan & Klinik Ditjen Migas Adakan Webinar 'Bangkit Lawan Corona dengan Protokol Covid-19'

36 Agen Perubahan Ditjen Migas Gelar Serangkaian 'Motivasi'

38 Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas Raih Penghargaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

39 NEWS
Ditjen Migas Konsisten Tekan Penyebaran Covid-19

Buka Opsi Skema KPBU, Ditjen Migas Gelar Konsultasi Publik Jargas

Jajaki Kerja Sama Baru, *The 11th Indonesia-Korea Energy Forum* Digelar Virtual

Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-75 Momentum Bangkitkan Sektor ESDM

contents

Pandemi Covid-19 Tak Surutkan Minat Mahasiswa STT Migas Balikpapan Ikuti Migas Goes to Campus

Ditjen Migas Kedatangan Enam CPNS Baru

Ditjen Migas Anugerahkan 88 Penghargaan Keselamatan Migas

Tutuka Ariadji Resmi Duduki Jabatan Dirjen Migas Baru

Profil Singkat Dirjen Migas Tutuka Ariadji

Dirjen Migas Tutuka Rapat Perdana dengan DPR

Dirjen Migas Tutuka Bersilaturahmi dengan Pegawai

Bahas PI 10%, Dirjen Migas Terima Kunjungan DPRD Muba

Dirjen Migas Serahkan DIPA kepada Sesditjen Migas

Tahun 2021, Pemerintah Targetkan Bangun Jargas 120.776 SR

Penghujung Tahun 2020, Ditjen Migas Tingkatkan Fasilitas dan Bagikan *Medical Kit*

Dirjen Migas Lantik 63 Pejabat Fungsional Ditjen Migas

Kali Ke-10, Ditjen Migas Adakan Sosialisasi Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi

Hampir 33 Tahun Mengabdikan, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Masuki Purna Bhakti

Jelang Libur Tahun Baru 2021, Menteri Arifin Tinjau Kesiapan Pasokan Energi ke TBBM Tanjung Gerem

5

JURNAL MIGAS

Geliat Mencari Sumber Migas Baru

Kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia turut terdampak pandemi Covid-19. Namun, hal tersebut tak lantas menyurutkan tekad untuk mencari sumber migas baru. Pemerintah tetap berkomitmen melakukan eksplorasi migas.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan, Pemerintah akan terus mengintensifkan program-program eksplorasi. Hal ini sangat mungkin dilakukan mengingat eksplorasi migas Indonesia masih potensial karena memiliki banyak sumber migas yang menjanjikan.

Target produksi 1 juta barel per hari

Arifin mengungkapkan, terdapat 68 cekungan migas yang belum digarap. Melalui eksplorasi ini, diharapkan dalam beberapa tahun ke depan Indonesia dapat memiliki data migas yang akurat sehingga menarik bagi investor.

Terkait industri migas, Arifin menambahkan, sebenarnya Pemerintah memiliki program jangka Panjang, yaitu meningkatkan produksi migas menjadi 1 juta barel per hari (bph) dan gas 12 miliar kaki kubik per hari (bscfd) pada tahun 2030 mendatang. Oleh sebab itu, pada tahun ini direncanakan akan dilelangkan 12 wilayah kerja (WK) migas. Sayangnya, lantaran pandemi, lelang tersebut ditunda.

“Kita sudah punya rencana tadinya untuk melelang 12 WK migas baru, yang mana harus kita tunda disebabkan kondisi daya tarik bisnisnya menurun,” kata Arifin.

Saat ini, rata-rata produksi minyak bumi Pertiwi hanya berkisar antara 700.000 hingga 800.000 barel/hari. Memang, perlu kerja keras untuk mencapai target 1 juta bph dan 12 bscfd di tahun 2030. Salah satu upaya peningkatan produksi yang bisa dilakukan adalah melalui pengelolaan WK potensial, seperti WK Rokan.

WK Rokan yang dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Pertamina Hulu Rokan pada Agustus 2021 masih memiliki potensi cadangan yang besar. Maka, kesuksesan alih kelola blok tersebut dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) menjadi salah satu kata kunci kesuksesan menuju capaian target 1 juta bph dan gas 12 bscfd.

Potensi cadangan minyak dari WK Rokan diperkirakan masih 2 miliar barel. Dengan potensi yang ada,

maka WK Rokan bisa menjadi tulang punggung produksi migas nasional dalam kurun waktu yang lama.

Selain itu, dibutuhkan stimulus, khususnya terkait sistem bagi hasil, perpajakan, dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha agar target 1 juta bph dan gas 12 bscfd tercapai. Terlebih, saat ini pandemi Covid-19 belum memiliki kejelasan berakhirnya dan persaingan global yang semakin ketat. Kondisi ini membuat Indonesia harus bisa bersaing untuk menarik investor.

Insentif ini dibutuhkan oleh industri hulu migas karena gap antara produksi dan konsumsi di dalam negeri semakin besar. Saat ini, sebagian besar wilayah kerja yang akan dikerjakan oleh kontraktor adalah wilayah kerja yang tua atau berada di wilayah kerja yang sulit.

Prioritas untuk EOR

Upaya lain yang dilakukan guna meningkatkan produksi migas Indonesia adalah melalui teknik

pengurusan minyak atau *Enhanced Oil Recovery* (EOR), seperti *chemical EOR*, *CO₂ Injection*, dan *steamflood*. Terkait hal ini, Dirjen Migas Tutuka Ariadji mengemukakan, akan memilih lapangan yang potensial untuk dilakukan EOR.

“Kami akan pilih lapangan mana yang kira-kira jadi prioritas perusahaan dan saya bersedia datang ke lapangan,” ujar Tutuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Senin (16/11).

Menurut Tutuka, perlu dilakukan terobosan untuk kegiatan EOR. Selama ini yang terjadi, EOR dilakukan pada satu sumur dan ketika selesai, tidak ada kelanjutannya. Ke depan, Pemerintah akan membuat peta jalan sehingga kegiatan ini dapat berkelanjutan.

Rencana ini juga telah disampaikan ke PT Pertamina (Persero) yang mulai 2021 setelah Blok Rokan dikelola BUMN tersebut, akan menjadi KKKS yang berkontribusi 70% dari total produksi migas nasional. Selain itu,

Pemerintah akan menyinkronkan program-program SKK Migas dan Pertamina terkait target produksi 1 juta barel.

Di samping EOR, Pemerintah melakukan upaya peningkatan produksi migas melalui beberapa program rutin dan terobosan, yaitu program *work routine*, seperti *infill drilling/step out* pada lapangan eksisting dan *work over/well service*.

“Dilakukan pula percepatan transformasi *resources* menjadi produksi dengan mempercepat POD baru dan POD *pending*, melakukan *commercial exercise* dengan *split adjustment*, *tax incentive*, dan *investment credit*,” kata Tutuka.

Proses panjang dan tidak mudah

Eksplorasi cekungan sedimen hingga menghasilkan rekomendasi sebuah WK migas bukan perkara mudah dan memerlukan proses panjang.

”

Penyiapan rekomendasi WK migas sangatlah penting. Ini dapat membuka peluang menemukan sumber daya migas di area-area yang baru. Para kontraktor migas biasanya hanya fokus di area yang sudah aktif. Di sinilah tugas Pemerintah untuk mencari potensi cekungan-cekungan baru”.

Fajar

Penyelidik Bumi pada Pusat Survei Geologi (PSG), Badan Geologi, Kementerian ESDM

Potensi Cekungan Migas:

(data Badan Geologi)



Total
Cekungan:

128

20

Sudah
berproduksi

27

Dibor
dengan
penemuan

13

Dibor
tanpa
penemuan

68

Belum
dieksplorasi

Ada 68 cekungan belum dieksplorasi, potensi cadangan migas Indonesia masih besar

EKPLORASI CEKUNGAN
HINGGA MENJADI REKOMENDASI
WILAYAH KERJA MIGAS



Fajar meneruskan, kajian komprehensif menjadi kegiatan paling utama sebelum penjajakan survei. Selanjutnya adalah menentukan terlebih dahulu target area survei melalui pemeringkatan cekungan (basin) sedimen berdasarkan aspek geologi. Hal ini dilakukan terutama bagi area-area punya potensi besar dan belum pernah terjamah. Inilah yang kemudian disebut sebagai survei geologi.

Tahap survei geologi menjadi fondasi awal dalam mengincar potensi sumber daya hidrokarbon di area baru tersebut. Proses ini dilalui dengan menentukan struktur bawah permukaan, susunan batuan, dan akumulasi hidrokarbon. Fokus utama pada tahapan ini adalah mengamati batuan yang ada pada permukaan bumi yang merupakan penyusun lapisan atas kerak bumi.

Tim kemudian bergerak melanjutkan tahapan berikutnya, yakni menjalankan survei geofisika. Pada

tahapan ini, Tim PSG bertujuan membuat model bawah permukaan bumi dengan mengandalkan data lapangan yang diukur baik dari permukaan bumi, di bawah permukaan bumi atau bisa juga di atas permukaan bumi dari ketinggian tertentu. Mereka secara tekun, konsisten dan terintegrasi melalui sejumlah ragam metode.

Pada tahapan ini, kandungan hidrokarbon diharapkan dapat ditemukan pada lapisan bumi dengan menggunakan peralatan gravimeter dan magnetometer. Sebuah alat yang berfungsi untuk membaca besar gravitasi dan medan magnet bumi.

Berbekal data dari PSG yang mencatat 68 cekungan belum dieksplorasi, Fajar dan tim kemudian mengklasifikasikan survei lanjutan berdasarkan keberadaan seismik data. Hasilnya, sebanyak 49 cekungan sudah memiliki data seismik dan yang belum punya seismik data ada 19 cekungan. Masing-masing

cekungan diperlakukan dengan metode yang berbeda-beda.

Akuisisi seismik 2D menjadi metode paling awal dalam menentukan cekungan yang punya data seismik. Metode ini dilakukan selama enam bulan dengan teknologi baru. Pembaharuan teknologi ini diharapkan dapat meyakinkan para kontraktor migas untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut.

Setelah proses akuisisi data seismik selesai, akan dilakukan proses pengambilan data gelombang pasif (*passive seismic tomography*) selama enam bulan untuk mengetahui akumulasi hidrokarbon dan analisis (*processing*) data selama empat bulan. Proses ini berbarengan dengan penambahan data lapangan yang disebut G&G study selama dua bulan.

“Ketiga kegiatan tersebut dilakukan dalam tahun yang sama,” ungkap Fajar.

Adapun 19 cekungan yang belum punya data seismik dilakukan screening cepat dengan metode *remote sensing* dan *microseepage* selama delapan bulan. Metode ini meneropong potensi hidrokarbon dengan menggunakan data citra satelit dengan tingkat ketelitian 0,1 meter. Selanjutnya divalidasi dengan data rembesan mikro atau menganalisa karbon berukuran mikro dari hidrokarbon yang berada di bawah permukaan. Proses ini selanjutnya dinamakan survei geokimia.

Setelah melalui dua metode tersebut, metode berikutnya sama persis dengan apa yang dilakukan terhadap cekungan yang sudah punya seismik data, yakni *passive*

seismic tomography dan G&G Study. “Semua kegiatan tersebut dapat dilakukan bersamaan. Hasil kegiatan pada area yang tidak memiliki data seismik akan dilakukan akuisisi data seismik pada tahun berikutnya,” tutur Fajar.

Survei seismik merupakan ujung dari proses pencarian sumber migas ini. Upaya ini menjadi bagian dari pencarian cadangan migas di bawah permukaan bumi menggunakan gelombang seismik, hal itu dilakukan dalam rangka eksplorasi daerah prospek hidrokarbon (minyak dan gas bumi).

Pada tahapan ini, tim survei akan mencari cekungan yang diduga memiliki kandungan minyak dan

gas bumi, dengan cara membuat gelombang kejut. Selanjutnya, radiasi gelombang tersebut akan direkam dengan seismometer. Data inilah yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan dalam menginterpretasikan struktur lapisan bawah permukaan bumi, besarnya lokasi, dan besar *reservoir* yang ada.

Empat tahun sudah Fajar dan tim berjibaku di lapangan, mulai dari menyusuri sungai di pedalaman dengan ketinting, bermalam di hutan perbatasan, hingga fasih makan di atas kapal dengan guncangan ombak akibat angin siklon tropis. Namun usaha tim PSG berbuah manis dengan merekomendasikan 38 wilayah kerja migas untuk ditawarkan kepada para kontraktor migas dalam kurun waktu empat tahun, yakni 2015 - 2109.

Rekomendasi WK Migas ini kemudian diberikan kepada Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM untuk ditawarkan ke kontraktor migas.

Pada tahun 2020 ini, PSG tengah melaksanakan survei di tujuh WK Migas dengan detil satu WK Non-Konvensional Sumatera Tengah, tiga WK Konvensional (Banjarnegara, Jawa Timur Offshore, Buton) serta satu Survei Geologi dan Geofisika Migas Cekungan Pembuang.

Fajar juga mengamini bahwa potensi migas di Indonesia tergolong masih menjanjikan. Dari 128 cekungan, ujanya, 20 di antaranya sudah memproduksi migas, 27 cekungan lainnya sudah dibor dan ditemukan migas. Lalu, 13 cekungan dibor tanpa penemuan dan sisanya belum dieksplorasi.

“Sebagian besar cekungan berada di Indonesia bagian Timur,” jelas Fajar. ●

38 Rekomendasi WK Migas Nasional



Sebaran Rekomendasi WK Migas 2015-2019

1. Singkawang	9. Tomori	17. Seram Onshore
2. Banyumas	10. Morowali Selatan	18. Maybrat
3. Tarakan	11. Ebun	19. Arguni Utara
4. Tanjung Selor	12. Selabangka	20. Kaimana
5. Enrekang	13. Obi	21. Akimeugah
6. Tomini	14. Kolbano	22. Tanah Merah Utara
7. Ampana	15. Tanimbar Timur	23. Merauke
8. Balantak	16. Kai Timur	

Migas Nasional dengan data potensi

Rekomendasi Sumber Daya Migas Konvensional	Lead	Minyak (MMBO) Million Barrels of Oil	Gas (TCF) Trillion Cubic Feet
24. Teluk Bone Utara	11	239,79	1,16
25. Misool Timur	5	69,94	0,26
26. Atsy	3	750	0,9
27. Mamberamo	3	-	7,58
28. Boka	4	930	1,11
29. Buru	16	118,54	0,12
30. Aru Tanimbar Offshore	10	-	0,14
31. Biak	2	8,44	0,01
32. Wamena	3	263,75	0,40
33. Sahul	8	150,75	0,18
34. Selaru	2	4,060	4,8
35. Arafura Selatan	2	6,144,54	7,36

Sumber Daya Migas Non-Konvensional	Sweet Spot	Potensial Shale Oil Million Barrels of Oil	Potensial Gas Oil Trillion Cubic Feet
36. Jambi	2	-	-
37. Kutai	3	-	46,79
38. Kutai Timur	4	1,472,46	37,94



Memacu *Lifting* Migas Efektif dan Efisiensi Biaya Operasi

Kinerja *lifting* (produksi siap jual) hulu migas sepanjang tahun 2020 masih mendapatkan tantangan yang berat dengan turunnya harga minyak dunia dan wabah pandemi Covid-19. Namun, bukan berarti menyerah terhadap kondisi yang ada. Pemerintah bekerja sama dengan *stakeholder* lainnya tetap berupaya memacu *lifting* migas yang efisien dan efisien dari segi biaya operasi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8), berencana mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Optimalisasi PNBP ini salah satunya berasal dari kegiatan hulu migas antara lain dengan perencanaan *lifting* migas yang efektif dan efisiensi biaya operasi migas.

“Langkah untuk mengoptimalkan PNBP antara lain dengan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan, inovasi layanan, perluasan objek audit bersama, perencanaan *lifting* migas yang efektif serta efisiensi biaya operasi migas,” kata Presiden Jokowi.

Hal itu merupakan salah satu kesimpulan Rapat Kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dengan Komisi VII DPR, Rabu (2/9). Raker ini merupakan tindak lanjut pidato Presiden Joko Widodo mengenai Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2021 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 14 Agustus 2020 lalu.

Saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Rabu (2/9), Menteri ESDM Arifin Tasrif memaparkan, target *lifting* migas pada APBN 2020 sebesar 1,946 juta barel setara minyak per hari (bopd), terdiri dari *lifting*

minyak bumi sebesar 755 ribu barel minyak per hari dan *lifting* gas bumi sebesar 1,191 juta barel setara minyak per hari. Sementara itu, *lifting* migas dalam RAPBN tahun 2021 ditetapkan sebesar 1.712.000 bopd, terdiri dari *lifting* minyak 705.000 barel per hari dan *lifting* gas bumi sebesar 1.007.000 barel setara minyak per hari.

Selain itu, Pemerintah dan Komisi VII DPR juga menyepakati ICP tahun 2021 sebesar US\$45 per barel atau sama dengan Nota Keuangan. Pertimbangannya, antara lain realisasi ICP dari bulan Januari hingga 28 Agustus 2020 mencapai US\$40,10 per barel dengan *outlook* rata-rata

tahun 2020 sebesar US\$35–40 per barel. ICP rata-rata tanggal 1 sampai dengan 28 Agustus 2020 sebesar US\$41,66 per barel.

“Dinamika harga minyak dunia sangat sulit diduga, berdasarkan proyeksi beberapa pihak dalam *Polling Reuters* dan *Short Term Energy Outlook* dari US-EIA-DOE, harga minyak dunia tahun 2021 diperkirakan pada kisaran US\$45,53–49,85 per barel,” jelas Menteri Arifin.

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga minyak seperti OPEC+ yang melakukan kebijakan pemotongan produksi minyak mentah mengimbangi kekhawatiran melemahnya permintaan minyak akibat pandemi Covid-19.

Alih kelola Blok Rokan

Lifting migas yang efektif dan efisien biaya operasi memang menjadi satu dari sejumlah pekerjaan besar. Kepada Dirjen Migas yang baru Tutuka Ariadji, Menteri ESDM mengungkapkan target Pemerintah ke depan, yakni untuk meningkatkan *lifting* dan menekan subsidi. Arifin menegaskan, sejumlah upaya di sisi hulu dan hilir harus dilakukan tanpa mengurangi apa yang dibutuhkan masyarakat. Kuncinya yakni dengan efisiensi.

Tutuka Ariadji pada Jumat, (6/11), tak menampik tantangan besar di atas. Ia mengutarakan bahwa tugas paling berat sebagai Dirjen Migas baginya saat ini adalah memastikan alih kelola Blok Rokan dari Chevron Pacific Indonesia kepada PT Pertamina (Persero) berjalan lancar. Seperti diketahui, alih kelola Blok Rokan dari Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina (Persero) akan berlangsung pada Agustus 2021 mendatang.

Berdasarkan data SKK Migas, hingga September 2020, *lifting* minyak dari Blok Rokan mencapai 176.298

barel per hari (bph), lebih tinggi 3,7% dari target yang ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang sebesar 170.000 bph.

Tutuka menyebut pihaknya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan Pertamina, kemudian menguraikan masalah yang ada. Dimulai dari pembahasan sisi makro terlebih dahulu, lalu dilanjutkan ke aspek-aspek yang lebih detail.

“Saya kira, terus terang saja Rokan ini paling berat dan saya harus masuk dahulu untuk kerja sama dengan Pertamina, kemudian kita menguraikan masalah utamanya, dari sisi makronya, baru ke detail. Jadi, terlalu dini untuk dijawab sekarang,” ungkapnya.

Tidak hanya Rokan yang alih kelolanya diharapkan bisa berjalan dengan lancar, pekerjaan lain yang tak kalah berat yakni mencapai produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari (bph) pada 2030. Dia menegaskan, ini adalah tugas yang harus dilaksanakan sebagaimana diperintahkan Menteri ESDM.

“Saya kira itu tugas yang harus saya laksanakan. Tadi Pak Menteri menyatakan itu, ya saya harus melaksanakannya,” tegasnya.

Lifting minyak lampau target

Di tengah pandemi Covid-19, kinerja hulu minyak dan gas bumi (migas) tetap menunjukkan perkembangan positif melalui tercapainya capaian *lifting* migas di kuartal III 2020. Realisasi *lifting* minyak Indonesia mencapai 100,2% atau 706,2 ribu barel minyak per hari dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sebesar 705 ribu bopd.

Hingga September 2020, tercatat *lifting* migas sebesar 1.689 bopd

dengan rincian *lifting* minyak sebesar 706,2 bopd dan *lifting* (salur) gas sebesar 5,502 juta standar kubik per hari (mmscfd) atau 99,3% dari target APBN-P, yakni 5,556 mmscfd.

Guna mengawal keberlangsungan kegiatan usaha hulu migas, dicanangkan empat strategi untuk mendukung *long term plan* (LTP), yaitu *improving existing asset value*, *resource to production* (R to P), *Enhanced Oil Recovery* (EOR), dan eksplorasi. Hingga September 2020 telah berhasil diselesaikan survei seismik 2D di open area sepanjang 25.150 km dan di wilayah kerja aktif sepanjang 1.779 km sehingga total saat ini mencapai 26.929 km.

Selain itu, sepanjang 2020 telah dilakukan 11 pemboran sumur eksplorasi dengan sukses rasio mencapai 55%. Juga dilaksanakan pemboran sumur dengan target *big fish-giant* sebanyak enam sumur *wildcat* dengan dua sumur mengonfirmasi penemuan.

Plan of Development (PoD) juga berhasil dipercepat. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mempertahankan cadangan migas secara berkelanjutan dengan target *Reserve Replacement Ratio* (RRR) mencapai 100% setiap tahunnya. Hingga September 2020, RRR telah mencapai 69,6% dari penyelesaian 15 PoD dengan penambahan cadangan sebesar 514 juta barel minyak ekuivalen (mmboe).

Terkait dengan penyelesaian proyek migas, hingga saat ini telah diselesaikan 9 proyek dari 14 proyek yang akan *onstream* tahun ini. Dari keseluruhan proyek tersebut, diperoleh tambahan produksi sebesar 3.182 bopd dan 296 mmscfd. ●

Fleksibilitas Investasi Migas Demi Tingkatkan Minat Investor

Industri hulu migas dunia saat ini sedang mengalami tantangan hebat. Pandemi Covid-19 telah membuat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) melemah. Harga minyak pun ikut terperosok. Imbasnya, investasi hulu migas dunia turun hingga US\$125 miliar. Bagaimana di Indonesia?



Sejumlah tantangan memang harus dihadapi oleh Indonesia untuk mendorong peningkatan investasi migas di tanah air. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak daya tarik industri hulu migas Indonesia.

Dua opsi

Salah satu upaya tersebut terlihat pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Aturan ini memberikan kesempatan bagi investor untuk memilih bentuk kerja sama, yaitu *cost recovery* atau *gross split*. Untuk lapangan migas baru, mayoritas investor memilih kontrak kerja sama *cost recovery*.

Sebelumnya, Pemerintah telah menerbitkan Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Bentuk kontrak ini telah diaplikasikan pada penawaran wilayah kerja (WK) migas tahun 2017-2019 dan perpanjangan/alih kelola kontrak kerja sama (KKS), sebagai alternatif bentuk kontrak yang sudah ada di Indonesia.

Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* telah mengalami tiga kali perubahan. Perubahan pertama melalui Permen ESDM Nomor 52 Tahun 2017 di mana dilakukan perubahan *terms* kontrak bagi hasil *gross split*, yaitu parameter dan koreksi *split* 10 komponen variabel dan tiga komponen progresif. Selain itu, tambahan bagi hasil untuk komersialisasi lapangan tergantung keekonomian lapangan.

Perubahan kedua melalui Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2019 di mana dilakukan penyempurnaan komponen variabel TKDN dan penyempurnaan komponen progresif tentang produksi kumulatif.

Terakhir, perubahan ketiga melalui Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2020 adalah penegasan pemberlakuan bentuk kerja sama dan fleksibilitas bentuk kontrak bagi hasil *gross split* atau *cost recovery*. Adapun perubahan aturan *gross split* tersebut adalah:

Dalam Pasal 1 menuliskan bahwa beberapa ketentuan dalam Permen ESDM No. 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permen ESDM No. 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1216) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama yang akan diberlakukan untuk suatu WK dengan mempertimbangkan tingkat risiko, iklim investasi, dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara.
 - (2) Penetapan bentuk dan ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bentuk: a. Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*; b. Kontrak Bagi Hasil dengan mekanisme pengembalian biaya operasi; atau c. kontrak kerja sama lainnya.

Dalam hal Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat persyaratan:

- a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
 - b. pengendalian manajemen operasi berada pada SKK Migas; dan
 - c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Kontraktor.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a menggunakan mekanisme bagi hasil awal (*base split*) yang dapat disesuaikan berdasarkan komponen variabel dan komponen progresif.

Pasal 25 diubah dan ditambahkan: Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

 - a. Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak yang bersangkutan.
 - b. Dihapus.
 - c. Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya telah ditandatangani sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dapat mengusulkan perubahan bentuk Kontrak Kerja Samanya menjadi Kontrak bagi hasil *gross split*.
 - d. Dalam hal Kontraktor mengusulkan perubahan bentuk Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam huruf c, biaya operasi yang telah dikeluarkan dan belum dikembalikan dapat diperhitungkan menjadi tambahan *split* bagian Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

- e. Terhadap penunjukan PT Pertamina (Persero) atau afiliasinya sebagai pengelola WK yang Kontrak Kerja Samanya belum ditandatangani, Menteri menetapkan bentuk Kontrak Kerja Samanya.

Menurut Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam sebuah kesempatan belum lama ini, kecenderungan pemilihan bentuk kontrak *cost recovery* dalam pengembangan lapangan migas baru merupakan hasil diskusi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

“Jadi kita rasakan dengan kebijakan *gross split* kemarin, memang animo (investor) agak berkurang dan kita dengarkan (masukannya). Kita panggil para pelaku bisnis migas ini, apa sih yang menjadi masalahnya. Jadi memang mereka menyampaikan kalau *gross split* (lebih tepat) untuk lapangan yang sudah dikerjakan karena sudah bisa menaksir (biaya). Tapi di sisi lain, *gross split* menyederhanakan proses dibandingkan *cost recovery*. Untuk lapangan baru, para pelaku bisnis migas lebih *prefer* ke *cost recovery*,” ujar Menteri ESDM.

Investor beralasan, risiko yang harus ditanggung untuk lapangan baru lebih besar ketimbang lapangan eksisting. Oleh karena itu, investor lebih merasa nyaman menggunakan kontrak *cost recovery*.

“Mereka merasa risiko yang dihadapi itu akan cukup besar, mencakup masalah finansial dan sebagainya. Dan ini mereka perlu adanya *security* juga. Kayak orang menebak. Kalau tebakannya salah, dia rugi. Tapi kalau betul, dia untung. Jadi dari pertimbangan-pertimbangan itu kita buka dua opsi (*cost recovery* atau *gross split*),” katanya.

Selain bentuk kontrak kerja sama, Pemerintah juga menerima masukan

terkait perpajakan dan akses data migas. Sebagai tindak lanjutnya, Kementerian ESDM bersama instansi lainnya terus berupaya mengatasi permasalahan tersebut.

“Kita harapkan persyaratan-persyaratan untuk membuka iklim investasi di migas ini bisa kita perbaiki. Kita sempurnakan supaya lebih menarik bagi mereka,” tambah Menteri Arifin.

Dalam kesempatan yang berbeda, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto sempat mengungkapkan, agar investasi migas tetap menarik, DPR mendorong dilakukannya penyederhanaan peraturan.

Sugeng mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemerintah meningkatkan iklim investasi hulu migas melalui Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Peraturan ini memberikan penegasan pemberlakuan bentuk kontrak kerja sama dan fleksibilitas terkait kontrak bagi hasil, yaitu *cost recovery* atau *gross split*.

“Di hulu migas sekarang operator bisa memilih menggunakan kontrak *cost recovery* atau *gross split*. Itu salah satu regulasi (yang telah dilakukan Pemerintah). Selama ini di hulu migas menurut catatan kami, kurang menarik kalau hanya (menggunakan) satu skema saja,” kata dia.

Memberikan kenyamanan

Di tempat terpisah, Dirjen Migas Tutuka Ariadji mengatakan, pemberian fleksibilitas tersebut diharapkan akan menarik minat investor di hulu migas untuk masuk dan menanamkan dananya di Indonesia.

Tutuka mengatakan fleksibilitas tersebut diberikan untuk memberikan kenyamanan bagi KKKS agar

bisa memilih dan menghitung keekonomian lapangan migas yang dioperasikan agar menguntungkan sesuai *portofolio* masing-masing perusahaan dan juga lapangan.

“Tentunya akan dibandingkan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing skema itu. Harapannya dengan demikian lebih menarik investor,” ungkapnya dalam sebuah acara di TV belum lama ini.

Tutuka mengatakan selain itu, Pemerintah juga memberikan kesempatan bagi KKKS terkait keterbukaan data serta berbagai jenis insentif lainnya. Harapannya bisa memacu investasi di hulu migas lebih besar.

Ia bilang di tahun ini saja kendati pandemi Covid-19, Pemerintah masih bisa mempertahankan penurunan investasi migas hanya US\$500 juta dari US\$12,2 miliar ke US\$11,7 miliar.

“Jadi kondisi yang sulit masih bisa mempertahankan itu, harapannya ke depannya bisa menarik dengan perubahan-perubahan kebijakan tadi, makin bergairah sambil menunggu harga minyak yang naik,” jelas Tutuka.

”

Kita harapkan persyaratan-persyaratan untuk membuka iklim investasi di migas ini bisa kita perbaiki. Kita sempurnakan supaya lebih menarik bagi mereka,”

Arifin Tasrif

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Ditjen Migas pun telah melakukan sosialisasi Permen ESDM No. 12 Tahun 2020. Salah satunya atas undangan Jakarta Scout Check (JSC), Selasa (6/10). Sosialisasi yang berlangsung secara virtual ini memaparkan Permen ESDM No. 12 Tahun 2020 di depan para anggota JSC, yaitu sebuah forum dengan para anggota perusahaan migas di Indonesia yang bertujuan mempromosikan perkembangan industri migas Indonesia yang secara rutin mengadakan *sharing* informasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di antara para anggotanya.

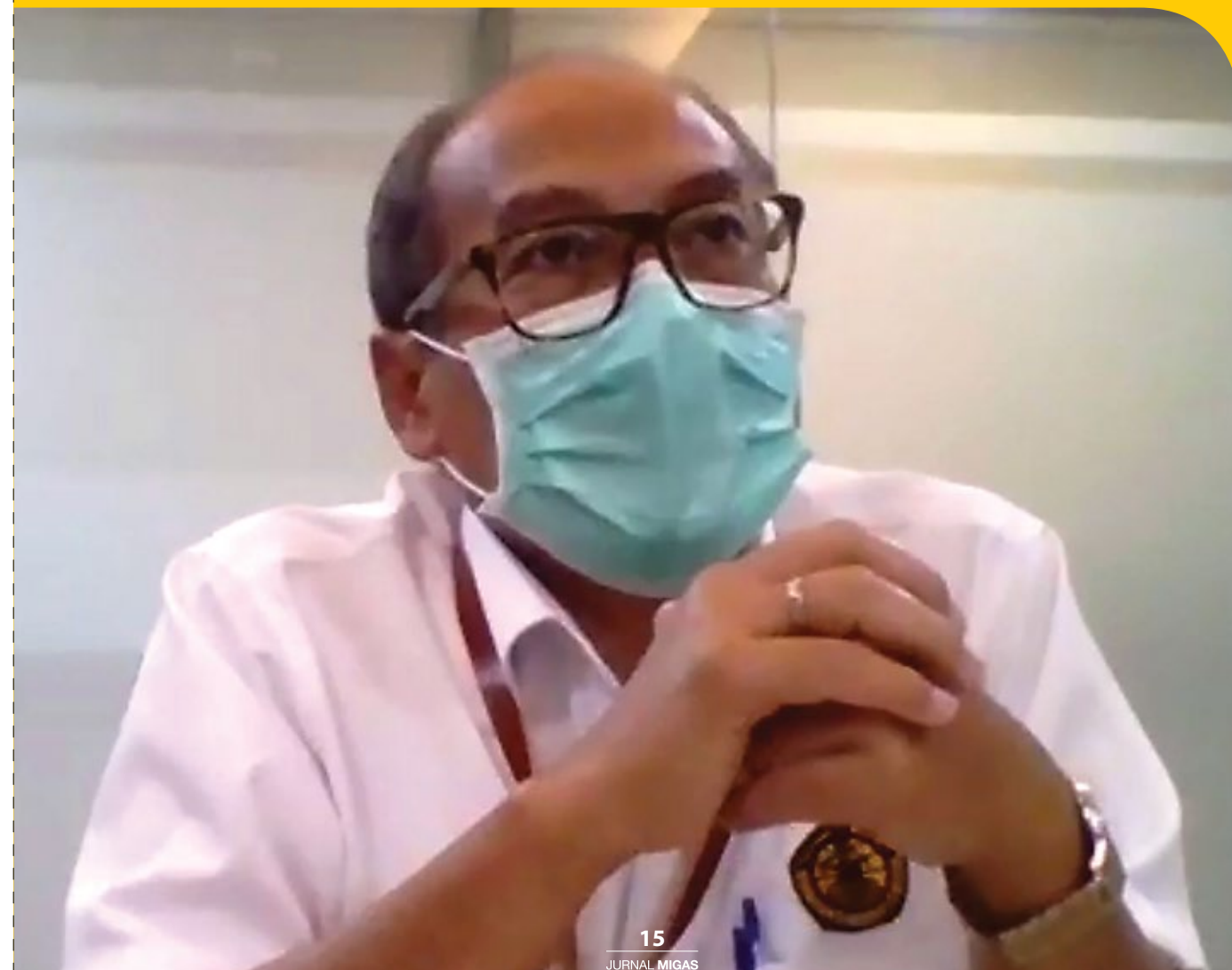
Melalui sosialisasi ini, pemangku kepentingan akan mendapatkan pemahaman yang sama mengenai

implementasi fleksibilitas dan keberlakuan bentuk kontrak kerja sama migas baik dalam rangka penawaran WK baru migas yang akan datang maupun implementasinya kepada proses perpanjangan atau alih kelola kontrak kerja sama migas.

Di samping itu, Ditjen Migas saat ini masih terus melakukan evaluasi terkait beberapa opsi penerapan bentuk kontrak untuk rencana penawaran WK Migas selanjutnya maupun untuk pengelolaan WK migas yang akan berakhir kontraknya.

Untuk penerapan bentuk kontrak pada lelang reguler WK migas,

terdapat opsi peserta lelang diberi kesempatan untuk memilih bentuk kontrak sesuai kecocokan setiap perusahaan atau WK dilelang dengan salah satu bentuk kontrak yang telah ditentukan (*fix*). Sedangkan opsi untuk lelang penawaran langsung (melalui proses *joint study*), diberi kesempatan kepada pelaksana *joint study* memilih bentuk kontraknya. Jadi, untuk WK yang dilelang dengan mekanisme penawaran langsung, hanya akan ditawarkan salah satu bentuk kontrak saja, sesuai preferensi dari pelaksana studi bersama. ●





Mendorong Gasifikasi Batu Bara

Guna Menekan Impor LPG

Pemerintah mendorong percepatan proyek gasifikasi batu bara sebagai sumber energi alternatif. Gasifikasi batu bara dapat menghasilkan *Dimethyl Ether* (DME) sebagai substitusi LPG sehingga dapat menekan impor LPG yang terus meningkat.

Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM tahun 2020-2024 yang ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 18 September 2020 mengungkapkan, kebutuhan LPG setiap tahunnya hingga 2024 diperkirakan terus meningkat. Pada 2020 ini, kebutuhan LPG domestik diperkirakan mencapai 8,81 juta ton. Lalu, naik pada 2021 menjadi 9,51 juta ton dan menjadi 10,27 juta ton pada 2022. Angkanya pun terus melesat menjadi 11,09 juta ton pada 2023 dan 11,98 juta ton pada 2024.

Karena produksi LPG diperkirakan stabil dan tidak bertambah hingga 2024, yakni berada pada tingkat 1,97 juta ton per tahun, namun dari sisi kebutuhan LPG terus meningkat setiap tahunnya, maka peningkatan impor LPG setiap tahunnya tak terelakkan. Impor LPG pada 2020 ini diperkirakan sebesar 6,84 juta ton. Kemudian, naik menjadi 7,54 juta ton

pada 2021, 8,30 juta ton pada 2022, 9,12 juta ton pada 2023, dan 10,01 juta ton pada 2024.

Sejumlah kelebihan DME

“Kita kan masih banyak melakukan impor LPG. PT Pertamina (Persero) dengan PT Bukit Asam Tbk sedang melakukan proyek pengganti LPG, yaitu *Dimethyl Ether* (DME),” ungkap Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam sebuah kesempatan.

”

Diharapkan ke depan, ini (gasifikasi batu bara) masif dilakukan sehingga mengurangi ketergantungan kita terhadap impor LPG. Ini merupakan cerminan ketahanan energi nasional yang berlandaskan pada bahan baku lokal,”

Arifin Tasrif, Menteri ESDM

Arifin mengharapkan agar proyek hilirisasi batu bara kalori rendah ini dapat dilakukan secara masif.

Karakteristik DME memiliki kesamaan baik sifat kimia maupun fisika dengan LPG. Lantaran mirip, DME dapat menggunakan infrastruktur LPG yang ada sekarang, seperti tabung, *storage* dan *handling* eksisting. Campuran DME sebesar 20% dan LPG 80% dapat digunakan kompor gas eksisting.

Kelebihan lain adalah DME bisa diproduksi dari berbagai sumber energi, termasuk bahan yang dapat diperbarui antara lain biomassa, limbah, dan *Coal Bed Methane* (CBM). Namun saat ini, batu bara

kalori rendah dinilai sebagai bahan baku yang paling ideal untuk pengembangan DME.

DME memiliki kandungan panas (*calorific value*) sebesar 7.749 Kcal/Kg, sementara kandungan panas LPG senilai 12.076 Kcal/Kg. Kendati begitu, DME memiliki massa jenis yang lebih tinggi sehingga kalau dalam perbandingan kalori antara DME dengan LPG sekitar 1 berbanding 1,6.

Pemilihan DME untuk substitusi sumber energi bagi Pemerintah mempertimbangkan pada dampak lingkungan. DME dinilai mudah terurai di udara sehingga tidak merusak ozon dan meminimalisir gas rumah kaca hingga 20%.

Di samping itu, kualitas nyala api yang dihasilkan DME lebih biru dan stabil, tidak menghasilkan partikulat matter (pm) dan NOx, serta tidak mengandung sulfur. DME merupakan senyawa eter paling sederhana mengandung oksigen dengan rumus kimia CH_3OCH_3 yang berwujud gas sehingga proses pembakarannya berlangsung lebih cepat dibandingkan LPG.

Sementara itu, di tempat terpisah, Direktur Utama Bukit Asam Arviyan mengatakan, DME memiliki beberapa keunggulan.

“DME harganya tidak lebih mahal dari LPG. Kalau bisa akan lebih murah karena tidak ada komponen impor dan solar,” ujar Arviyan

Menarik minat

Kelebihan-kelebihan DME di atas menarik minat sejumlah perusahaan. Salah satu proyek gasifikasi batu bara yang tengah berjalan adalah antara Pertamina, Bukit Asam, dan Air Products and Chemicals, Inc. Rencananya, proyek dengan investasi senilai US\$2,4 miliar tersebut dibangun di Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan.

Proyek gasifikasi dimulai tahun ini dan akan diteruskan dengan persiapan pembangunan pabrik *coal to chemicals*. Bukit Asam menghitung komposisi batu bara pada pabrik tersebut mencapai 6 juta ton per tahun.

“Kami harapkan diselesaikan di triwulan III tahun ini, kemudian di 2021 itu masuk tahap EPC (*Engineering Procurement Construction*) dan dalam waktu 36-48 bulan pabrik sudah bisa produksi DME,” kata Arviyan.

Setelah beroperasi, hilirisasi batu bara ditargetkan mampu memproduksi 1,4 juta ton DME, 250 ribu ton *methanol ethylene glycol* atau MEG, dan 300

ribu ton *methanol* per tahun. Arviyan berharap, produksi hasil gasifikasi batu bara berupa DME akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Bila gasifikasi batu bara di Tanjung Enim berhasil, Bukit Asam akan mengembangkan proyek hilirisasi di daerah lain. Arviyan mengatakan Peranap adalah target lokasi selanjutnya untuk proyek tersebut.

Selain proyek tersebut, PT Bumi Resources Tbk juga menggandeng perusahaan gasifikasi asal Amerika Serikat *Air Products*. Proyek gasifikasi ini akan dijalankan oleh konsorsium Grup Bakrie, yakni PT Bakrie Capital Indonesia, PT Bumi Resources Tbk, dan PT Ithaca Resources dengan perkiraan nilai proyek sekitar US\$2,5 miliar atau sekitar Rp36,7 triliun (asumsi kurs Rp 14.700 per US\$). Proyek ini akan dibangun di Batuta Industrial Chemical Park, Bengalon, Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Telah diuji coba

Gasifikasi batu bara sendiri adalah proses konversi batu bara menjadi produk gas yang dapat digunakan untuk bahan bakar maupun bahan baku industri kimia. Unit gasifikasi terdiri dari reaktor, pendingin gas (*scrubber*), penangkap ter (*tar*

electrostatic precipitator) pembersih gas (*washing tower*), pemisah uap (*fog drop*), *blower*, dan kolam penampungan ter (*tar pond*).

Dengan penerapan teknologi ini, selain ketergantungan terhadap BBM dapat dikurangi, dan secara tidak langsung akan mengurangi beban subsidi, akibat tingginya harga minyak dunia, juga akan meningkatkan nilai tambah batu bara, menambah devisa dan membuka kesempatan kerja.

Proyek gasifikasi yang sedang berjalan seakan menjadi jawaban terhadap permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (23/10). Saat itu, ia kembali menyinggung pentingnya hilirisasi industri batu bara.

Jokowi meminta produsen batu bara untuk segera mengembangkan industri turunan batu bara, mulai dari peningkatan mutu atau *upgrading*, pembuatan briket batu bara, kokas, pencairan batu bara, gasifikasi batu bara sampai dengan campuran batu bara cair.

“Saya yakin dengan mengembangkan industri turunan batu bara ini, saya yakin dapat meningkatkan nilai tambah komoditas berkali-kali lipat, mengurangi *core* bahan baku yang dibutuhkan industri dalam negeri seperti industri baja, industri petrokimia,” katanya.

Cadangan batu bara di Indonesia sendiri diperkirakan mencapai 91

miliar ton. Dengan tingkat produksi berkisar 200-300 juta ton per tahun, maka umur tambang akan dapat mencapai 100 tahun. Hal ini cukup aman untuk keberlanjutan industri pengguna batu bara, selain itu juga lebih ekonomis.

Kementerian ESDM sendiri, melalui Balitbang ESDM, telah menyelesaikan uji terap pemakaian DME 100% telah dilakukan di wilayah Kota Palembang dan Muara Enim pada bulan Desember 2019- Januari 2020 kepada 155 kepala keluarga dan secara umum dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, uji terap DME 20%, 50%, dan 100% dilakukan di Jakarta (Kecamatan Marunda) kepada 100 kepala keluarga pada tahun 2017.

Hasil uji uji terap menunjukkan mudah dalam menyalakan kompor, stabilitas nyala api normal, mudah dalam pengendalian nyala api, warna nyala api biru dan waktu memasak lebih lama dibandingkan LPG. Secara teknis, pemanfaatan DME 100% layak untuk mensubstitusi LPG untuk rumah tangga dengan menggunakan kompor khusus DME. Waktu memasak lebih lama 1,1 hingga 1,2 kali dibandingkan dengan menggunakan LPG.

Salah satu kisah sukses pembuatan bahan bakar dari proses gasifikasi batu bara adalah South African Coal Oil and Gas Corporation atau yang dikenal dengan Sasol di Afrika Selatan, yang saat ini memproduksi gas sintetik sebesar 55 juta Nm³/hari dengan menggunakan penggas Lurgi, dan memproduksi minyak sintetik sebanyak 150 ribu barel per hari melalui sintesis *Fischer-Tropsch*.

Saat ini, Sasol mempekerjakan 170 ribu karyawan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merupakan 2% tenaga kerja sektor formal di Afrika Selatan. Selain itu, Sasol juga menyumbang 4% GDP atau sekitar US\$ 7 milyar, serta menyuplai 40% kebutuhan BBM dalam negeri Afsl (28% dari batu bara). ●



Di Tengah Pandemi Covid-19, Pembangunan Jargas Tetap Berlanjut

Pemerintah tetap melanjutkan pembangunan jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga di tengah pandemi Covid-19. Pada tahun ini, Pemerintah menargetkan membangun sebanyak 127.864 sambungan rumah (SR) di 23 kabupaten/kota.

Alokasi anggaran untuk membangun 127.864 SR tersebut mencapai Rp1,428 triliun. Awalnya, Pemerintah berencana membangun 266.070 SR dengan anggaran sebesar Rp3,029 triliun. Namun, lantaran pandemi Covid-19 membutuhkan penanganan yang serius dan dari sisi anggaran diperlukan adanya *refocusing* anggaran untuk membantu penanggulangan wabah tersebut, maka pembangunan jargas berubah menjadi 127.864 SR.

Sejak pertama kali digagas tahun 2009, Kementerian ESDM mencatat realisasi pembangunan jargas hingga akhir 2019 sepanjang 537.936 SR. Mayoritas jargas itu dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, total jargas yang dibangun dengan dana APBN sebanyak 400.269 SR. Selain itu, jargas yang dibangun dengan dana non APBN sebanyak 137.667 SR.

“Total jargas 537.936 SR. Untuk 74,41% dari APBN, 24,72% dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, dan PT Pertamina (Persero) 0,87%,” ucap Tutuka dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR, Senin (16/11).

Menurut dia, ada penambahan pembangunan jargas selama 2019 sebanyak 74.496 SR. Dengan kata lain, total jargas pada 2018 lalu baru sebanyak 463.440 SR. Pemerintah menargetkan pembangunan jargas tahun depan sebanyak 120.776 SR.

“Ini mencakup 21 kabupaten/kota, di Sumatera, Sulawesi, dan Jawa,” kata Tutuka.

Skema KPBU

Jargas yang telah terbangun ini perlu peningkatan lebih jauh mengingat pembangunannya masih dalam spot-spot kecil dalam satu daerah. Hal ini tak terlepas dari kendala terbatasnya APBN. Padahal, biaya pembangunan jargas yang *notabene* merupakan infrastruktur publik memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Dengan kondisi tersebut, untuk mempercepat pembangunan jargas secara masif dalam upaya mengurangi beban subsidi LPG dan penyediaan energi yang lebih bersih, aman, dan efisien kepada masyarakat serta sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di mana Pemerintah menargetkan pembangunan jargas sebanyak 4 juta SR. Jumlah tersebut



diharapkan terwujud melalui skema pembiayaan melalui APBN, Kerja Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan BUMN.

KPBU memiliki sejumlah keunggulan, seperti menjaga keberlangsungan fiskal negara, dapat diperoleh infrastruktur yang berkualitas, *risk sharing*, potensi investasi, pembiayaan proyek, *project delivery* tepat waktu, dan kepastian pengembalian investasi. Bagi swasta, KPBU menjadi pintu masuk investasi bagi swasta, adanya pengembalian investasi melalui pembayaran secara berkala oleh Pemerintah, dan banyaknya regulasi yang mengatur mengenai skema ini sehingga pelaksanaannya pun aman.

Meski nantinya pembangunan jargas dikerjasamakan, KPBU bukan pengalihan kewajiban Pemerintah dalam penyediaan layanan kepada masyarakat. Selain itu juga bukan privatisasi barang publik serta bukan pinjaman Pemerintah kepada swasta.

Pemerintah menyadari bahwa skema KPBU ini belum terlalu umum. Untuk itu, Kementerian Keuangan menyediakan fasilitas penyiapan proyek (PDF) dan pendampingan transaksi. PDF diperlukan untuk memastikan kelayakan dan *bankability* proyek serta kewajaran alokasi kewajiban dan alokasi resiko yang harus ditanggung Pemerintah.

“Harapan Pemerintah, dengan keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui KPBU, pembangunan jargas akan semakin masif dan mencapai target sesuai RPJMN,” tutur Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso dalam Konsultasi Publik Jargas dengan Skema KPBU di Kota Medan, Rabu (19/8).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan

Infrastruktur, pengadaan infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan badan usaha harus disertai dengan studi pendahuluan, yaitu kajian awal untuk memberikan gambaran mengenai perlunya penyediaan suatu infrastruktur tertentu serta manfaatnya apabila dikerjasamakan dengan badan usaha pelaksana melalui KPBU.

Selanjutnya dalam melakukan identifikasi KPBU, Pemerintah melakukan Konsultasi Publik yaitu proses interaksi antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN/BUMD dengan masyarakat termasuk pemangku kepentingan.

“Konsultasi publik ini untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas KPBU guna mendiskusikan penjelasan dan penjabaran terkait dengan rencana KPBU sehingga diperoleh hasil penerimaan tanggapan dan masukan dari pemangku kepentingan dan evaluasi terhadap hasil yang didapat dari Konsultasi Publik dan implementasinya dalam KPBU,” papar Alimuddin.

Alimuddin menjelaskan, kemampuan keuangan Pemerintah sangat terbatas. Di sisi lain, Pemerintah terus memperhatikan kelompok-kelompok masyarakat dan usaha kecil melalui pemberian subsidi LPG 3 kg. Padahal, 75% LPG berasal dari impor sehingga mengganggu fiskal. Pada tahun 2019, total subsidi yang harus ditanggung Pemerintah, termasuk LPG 3 kg, mencapai lebih dari Rp42 triliun. Untuk mengatasi situasi tersebut, diperlukan langkah untuk menekan subsidi antara lain membangun jargas secara masif dengan bekerja sama dengan badan usaha.

“Melalui pembangunan jargas skema KPBU ini, diharapkan jargas dapat dibangun lebih banyak dan tentunya dengan insentif dan dukungan dari Pemerintah,” papar Ali di kesempatan berbeda.

Mendapat dukungan luas Pembangunan jargas sejauh ini mendapat dukungan luas dari pemerintah kota/kabupaten. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa, misalnya, memastikan komitmen Pemda mendukung pembangunan jargas.

“Kami berkomitmen mendukung pembangunan jargas dan kita pastikan tidak ada kendala di lapangan. Teman-teman, yaitu para lurah dan camat, melakukan sosialisasi *door to door* mengenai pentingnya jargas ini. Bahkan, sering kami katakan ke Satpol PP agar bila perlu pakai pakaian preman saat di lapangan untuk mengawal pembangunan jargas,” katanya dalam Konsultasi Publik dengan Skema KPBU di Kota Palembang, Selasa (22/9).

Dukungan serupa datang dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon, khususnya melalui skema KPBU. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Rahmat Soetrisno menyampaikan, kebutuhan LPG untuk rumah tangga di Kabupaten Cirebon cukup tinggi. Oleh sebab itu, Pemkab Cirebon mengapresiasi pembangunan jargas yang dilaksanakan oleh Ditjen Migas sebagai pengganti LPG.

“Terima kasih (jargas) sudah hadir di Kabupaten Cirebon sebanyak 6.105 sambungan rumah yang tersebar di lima desa di Kecamatan Kedawung. Ini merupakan energi alternatif yang hemat, aman dan ramah lingkungan,” katanya pada acara Konsultasi Publik dengan Skema KPBU di Kabupaten Cirebon, Selasa (29/9).

“Pemkab Cirebon mendukung pembangunan jargas. Kami minta dukungan dan kerja sama lurah dan camat. Mohon respon positif dari kita semua. Memang tugas berat Kementerian ESDM menekan belanja subsidi dengan memaksimalkan pemasangan jargas untuk rumah tangga,” tambahnya.



Kabupaten Cirebon awalnya termasuk salah satu daerah yang akan dibangun jargas APBN pada tahun 2020. Namun lantaran Pandemi Covid-19, rencana tersebut diundur ke tahun 2021.

Pemerintah Kota Batam pun mendukung rencana Pemerintah membangun jargas secara masif dengan KPBU, guna mencapai target 4 juta SR pada tahun 2024. Untuk mempermudah pelaksanaan rencana ini, Pejabat sementara Walikota Batam Syamsul Bahrum mengusulkan agar pembangunan jargas menggandeng sektor properti, terutama pengembang perumahan.

“Kami di tingkat hilir atau konsumen pemakai, menyambut baik program ini. Kami hadirkan camat dan lurah dalam acara ini untuk mendukung pelaksanaan rencana tersebut. Jelas sekali gas ini mudah digunakan, aman, murah dan *ready to use*,” ujar Syamsul Bahrum dalam Konsultasi Publik Pembangunan Jargas dengan Skema KPBU di Kota Batam, Selasa (6/10).

Menurut Syamsul, jargas sangat cocok dikembangkan di Kota Batam

karena kawasan ini tidak hanya terkenal sebagai kota industri, tetapi juga banyak dibangun perumahan. Bahkan, ia mengusulkan agar dikeluarkan aturan untuk mewajibkan pengembang membangun jargas.

“Kalau perlu kita buat aturan supaya wajib sekian persen perumahan-perumahan yang akan dibangun, harus memiliki fasilitas gas. Ini akan menjadi sarana promosi mereka juga,” ujar Syamsul.

Supaya pembangunan jargas tidak tambal sulam, diusulkan agar dilakukan pemetaan perumahan yang sedang dibangun dan akan dibangun. Setelah pemetaan rampung, menurut Syamsul, tugas berikutnya adalah meyakinkan masyarakat agar mau memasang jargas di rumahnya.

Pembangunan jargas juga diapresiasi oleh masyarakat pengguna langsung jargas. Salah satunya adalah Haposen, warga Kota Pekanbaru. Ia berterima kasih atas pembangunan jargas di daerahnya. Ia senang karena gas bumi mengalir 24 jam dan harganya relatif murah. Sebelumnya, per bulan ia menggunakan LPG 3 kg sebanyak 2 tabung. Agar mendapatkan harga sesuai HET, ia membeli di pangkalan.

“Kalau di pangkalan kan harus antri, tapi kita belinya seharga Rp 18.000. Di warung harganya bisa mencapai Rp 25.000. Dengan pakai jargas, perkiraan biaya yang harus saya bayar sekitar Rp 20.000, sesuai pemakaian,” katanya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, pembangunan jargas termasuk salah satu proyek strategis nasional. Ini merupakan upaya Pemerintah meningkatkan pemanfaatan gas untuk dalam negeri, mengurangi impor LPG sebesar 603.720 ribu ton per tahun, penghematan subsidi LPG sebesar Rp297,55 miliar per tahun, serta menghemat pengeluaran energi masyarakat Rp386 miliar per tahun. Jargas juga bermanfaat mengurangi defisit neraca perdagangan migas mencapai Rp2,64 triliun per tahun.

Kebutuhan gas untuk jargas relatif kecil di mana 0,1 mmscf dapat digunakan untuk memenuhi 10.000 SR. Oleh karena itu, Pemerintah terus mendorong pembangunannya agar jumlah masyarakat yang dapat menikmati manfaatnya semakin besar. Kriteria suatu kota dapat dibangun jargas adalah ketersediaan suplai gas, ketersediaan infrastruktur gas dan adanya pasar. ●

Berdampak Nyata, Paket Perdana Konversi BBM ke BBG untuk Petani Sasaran Tahun Depan Bertambah

Meski pandemi Covid-19 masih berlangsung, Kementerian ESDM, melalui Ditjen Migas, tetap melanjutkan pendistribusian paket perdana konversi BBM ke BBG untuk mesin pompa air petani sasaran tahun 2020. Salah satu program diversifikasi BBM ke BBG ini telah berdampak nyata terhadap masyarakat.



Tahun ini, pendistribusian paket perdana Konversi BBM ke BBG untuk Mesin Pompa Air Petani Sasaran Tahun 2020 ditutup di Kabupaten Banyumas, Jumat (20/11). Sebanyak 223 unit dibagikan untuk petani yang tersebar di 23 kecamatan di wilayah ini.

Penyerahan secara simbolis paket perdana digelar di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, dihadiri oleh Sesditjen Migas Iwan Prasetya Adhi, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto, Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas Widarso, perwakilan PT Pertamina (Persero) serta perwakilan petani penerima manfaat.

“Pada tahun 2020 ini, Kabupaten Banyumas pertama kali terpilih menjadi daerah sasaran Program Konversi BBM ke BBG untuk Petani Sasaran dengan jumlah paket perdana yang didistribusikan sebanyak 223 paket,” kata Sesditjen Migas Iwan Prasetya Adhi.

Program ini merupakan pelaksanaan Perpres Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air untuk Petani Sasaran. Program ini telah dilaksanakan sejak 2019 sebanyak 1.000 paket. Kemudian pada tahun 2020, dilaksanakan pendistribusian 10.000 paket konversi di 24 kabupaten/kota. Pada tahun 2021,

rencananya akan didistribusikan sejumlah 28.000 paket perdana.

Namun, tidak semua petani dapat memperoleh bantuan ini. Untuk menerima paket perdana, harus memenuhi kriteria, yaitu

- Memiliki lahan dengan luas lahan maksimal 0,5 hektar
- Untuk transmigran, memiliki maksimal 2 hektar dengan menunjukkan dokumen kepemilikan lahan
- Memiliki identitas petani yang direkomendasikan oleh kepala desa/camat, misalnya Kartu Tani, dan disahkan oleh Kepala Daerah dan atau Kepala Dinas Pertanian setempat
- Memiliki pompa air dengan mesin penggerak lebih kecil 6,5 HP

- Mesin pompa air yang dimiliki berbahan bakar bensin
- Belum pernah menerima bantuan yang sejenis (mesin pompa air)

Paket perdana yang diberikan kepada petani terdiri dari satu unit mesin, satu buah tabung LPG 3 kg, dan satu set konverter kit beserta asesorisnya. Paket ini diberikan Pemerintah secara gratis. Program ini menggunakan dana APBN. Oleh karena itu, segala dokumen dan dokumentasi dibuat selengkap mungkin.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Senin (16/11), Dirjen Migas Tutuka Ariadji menyampaikan, pengelolaan energi diarahkan menuju peningkatan akses energi secara merata dengan harga terjangkau dan tata kelola penyediaan energi yang lebih efisien. Untuk mendukung hal tersebut, penyediaan gas bumi harus diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan domestik dan mengurangi ekspor secara bertahap.

Bisa hemat hingga jutaan rupiah

Pendistribusian paket perdana konversi BBM ke BBG untuk mesin pompa air petani sasaran telah berdampak nyata terhadap masyarakat. Selain dapat menekan impor LPG, pendistribusian paket perdana Konversi BBM ke BBG untuk mesin pompa air petani sasaran juga bisa meningkatkan kesejahteraan petani.



Saya merasa bangga dan bahagia mendapat bantuan ini dari Pemerintah. Mewakili teman-teman petani, saya mengucapkan terima kasih,”

Enoh

Petani di Kabupaten Cianjur yang mendapat bantuan paket konversi Pemerintah

Enoh Saefudin (70 tahun), petani padi di Kabupaten Cianjur, makin bersemangat menjalani aktivitas sehari-harinya setelah mendapat bantuan paket perdana konverter kit berbahan bakar LPG 3 kg dari Pemerintah, sebagai bagian dari Program Konversi BBM ke BBG Untuk Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran Tahun 2020.

“Saya merasa bangga dan bahagia mendapat bantuan ini dari Pemerintah. Mewakili teman-teman petani, saya mengucapkan terima kasih,” ucap Enoh di sela-sela acara penyerahan secara simbolis paket perdana Program Konversi BBM ke BBG di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (21/10).

Enoh merupakan salah satu dari 400 petani di Kabupaten Cianjur yang mendapat bantuan paket konversi Pemerintah. Ini merupakan kali pertama petani Cianjur mendapatkan paket tersebut. Dia berharap, bantuan ini akan mempermudah petani mengairi sawahnya.

“Selama ini, kami menggunakan BBM untuk pompa air, sekali mengairi sawah bisa menghabiskan 5 liter BBM. Pakai LPG 3 kg, saya diberitahu petugas kalau satu tabung bisa dua kali pakai,” katanya.

Salah satu ketua kelompok tani di Kabupaten Cianjur ini menuturkan,

dalam sepekan para petani rata-rata mengairi sawah sebanyak dua kali untuk sawah dengan luas maksimal 1 hektar. Artinya, dibutuhkan 10 liter BBM yang tiap liternya Rp9.000. Jadi, biaya per minggunya Rp90.000 atau Rp360.000 per bulan. Total biaya untuk satu musim tanam yang waktunya tiga bulan, dibutuhkan Rp1.080.000.

Sementara itu, bila menggunakan mesin pompa berbahan bakar LPG 3 kg, dalam sepekan hanya dibutuhkan satu tabung seharga Rp20.000 hingga Rp25.000. Dalam satu musim tanam, dibutuhkan 12 tabung LPG 3 kg seharga Rp300.000. Ini berarti pengeluaran hanya 30% dibandingkan menggunakan mesin pompa air berbahan bakar BBM.

Biaya yang harus dikeluarkan Enoh apabila menggunakan mesin pompa air berbahan bakar BBM bisa lebih besar. Hal ini lantaran selang air yang dimilikinya sudah aus dan banyak berlubang. Akibatnya, air yang disedot untuk dialirkan ke sawah tidak maksimal.

“Selang kami sudah banyak yang berlubang. Paling hanya 75% airnya bisa sampai ke sawah krn banyak bocor di perjalanan. Dengan adanya alat baru ini, semua airnya bisa disalurkan ke sawah sehingga tidak butuh banyak bahan bakar,” paparnya lagi.

Kegembiraan senada juga diungkapkan Dian (40), petani dari Desa Ciherang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Cianjur. Selama ini, sawah miliknya merupakan tadah hujan sehingga sangat membutuhkan bantuan mesin pompa air untuk sawahnya.

“Sawah saya sangat jauh dari irigasi sehingga sangat membutuhkan bantuan pompa air untuk mengairi sawah. Saya senang karena mesin pompa air pakai LPG 3 kg ini katanya

lebih hemat dari pakai mesin pakai BBM,” ungkapnya.

Pola penanaman dan panen bisa berbeda antara satu wilayah dengan lainnya. Pola penanaman di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, misalnya, berbeda dengan Kabupaten Cianjur.

Budiharto dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen beberapa waktu lalu menjelaskan, dalam satu kali musim tanam atau sekitar 105 hari, para petani di wilayah Kabupaten Sragen rata-rata mengairi sawah sebanyak 44 kali. Sekali mengairi yang dimulai pukul 06.00 hingga 14.00, diperlukan BBM sekitar 5 liter atau Rp50.000. Sementara jika menggunakan LPG 3 kg, cukup menggunakan satu tabung saja yang dibeli rata-rata Rp20.000. Dengan demikian, penghematan yang diperoleh adalah Rp30.000 dikali 44, jumlahnya Rp1,32 juta.

Perhitungan ini dengan rata-rata sawah yang dikelola petani Sragen luasnya 0,3 hektar. Dengan demikian, untuk sekitar 1 hektar sawah, penghematan bisa mencapai Rp4 juta.

“Rata-rata, BBM dibelinya di pengecer sekitar Rp10.000 per liter. Kalau LPG 3 kg harganya Rp18.000 hingga Rp20.000 per tabung. Penghematan Rp30.000 sekali mengairi. Itu besar artinya bagi petani. Menggunakan LPG 3 kg jelas lebih murah,” tambah Budiharto seraya menambahkan bahwa para petani melakukan pemeliharaan mesin dengan baik.

Pengairan sawah terutama dilakukan dalam 3 tahap. Pertama, pada tahap awal penanaman. Kedua, masa pembentukan bunga yaitu umur 1,5 bulan. Ketiga, periode pematangan pada umur 70 hari.

“Di waktu-waktu tersebut, pengairan banyak dilakukan,” lanjut Budiharto.

Pada tahun 2019, Petani Kabupaten Sragen mendapat 350 paket perdana. Daerah lain yang juga memperoleh paket adalah 350 paket bagi petani di Klaten, 50 paket untuk petani di Malang dan 250 paket bagi petani di Bantul.

Paket perdana yang diberikan kepada petani terdiri dari 1 unit mesin, 1 buah tabung LPG 3 kg dan 1 set konverter kit beserta asesorisnya. Paket ini diberikan Pemerintah secara gratis.

“Para petani sangat bersyukur adanya bantuan ini karena Kabupaten Wajo memang sangat membutuhkan mesin untuk pompa air. Dengan adanya bantuan ini, petani kami bisa menambah lahan produksi,” ungkap Sudirlang, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, di kesempatan berbeda.

Hal senada juga dikemukakan Yus Warso, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bantul, Jawa Tengah. Ia mengungkapkan, “Kami sangat

berterima kasih atas inisiasi Kementerian ESDM melalui bantuan ini sehingga petani kami tambah semangat untuk bercocok tanam. Ini artinya tujuan menjadi petani maju, mandiri, dan modern akan tercapai”.

Dari pra hingga purnajual

Ditjen Migas mempersiapkan Program Konversi BBM ke BBG untuk Petani Sasaran mulai dari pra kegiatan sampai purnajual. Sebelum pelaksanaan, Ditjen Migas, menyelenggarakan Pra Rakor Program Konversi BBM ke BBG untuk Petani Sasaran Tahun 2020 di Swiss Belboutique Hotel, Yogyakarta, Kamis (27/8).

Hadir dalam acara tersebut antara lain Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Simon Himawan, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso, Muji Hartoto dari Itjen Kementerian ESDM, Hendra Arif dari PT Pertamina (Persero), perwakilan dari Kementerian

Pertanian, Safri Yanto dari Ditjen Migas serta perwakilan dari Dinas Pertanian dari 24 kabupaten/kota yang tahun ini mendapat paket konversi.

Pra Rakor ini dilaksanakan guna menyukseskan program konversi BBM ke BBG untuk petani sasaran. Pasalnya, program ini bukan hanya menjadi tugas Pemerintah, melainkan juga membutuhkan partisipasi dan kerja sama semua pihak.

Pada pelaksanaan program ini, pemerintah daerah bertindak sebagai garda terdepan. Peran pemda apabila mendapatkan alokasi program konversi BBM ke BBG untuk petani antara lain memastikan daftar nama calon penerima, menyiapkan lokasi pembagian, menyiapkan sarana dan prasarana seperti gudang penyimpanan, listrik, meja dan kursi, tempat untuk merakit dan tempat untuk mencoba paket konversi.

Terkait ketersediaan pasokan LPG, Pertamina menyatakan berkomitmen

menyediakan kebutuhan masyarakat. Kuota yang ditetapkan Pemerintah bersama DPR, telah memperhitungkan kebutuhan untuk petani dan nelayan yang menggunakan LPG 3 kg. Namun demikian, untuk Pemda yang masih membutuhkan penambahan pasokan LPG 3 kg, dapat mengajukan surat permintaan kepada Ditjen Migas dan Pertamina.

Tak kalah penting, informasi layanan purna jual juga patut disampaikan kepada petani. Hal ini penting bagi petani agar tidak kebingungan ketika harus mengganti *spare part* mesin yang aus atau lainnya. Informasi mengenai layanan purna jual selain harus disampaikan pada saat sosialisasi sebelum paket perdana dibagikan, tetapi juga menjadi bagian dari panduan tertulis yang dibagikan kepada petani.

Sesditjen Migas Iwan Prasetya Adhi berharap, para petani sasaran dapat memanfaatkan dan merawat dengan baik serta tidak memperjualbelikan paket perdana ini karena merupakan bantuan Pemerintah.

“Biasanya masa kritis (keuangan) itu menjelang tahun ajaran baru. Jangan dijual ya. Mudah-mudahan bantuan ini dapat berdampak pada perekonomian petani, yaitu mengurangi biaya operasional sampai dengan 50%,” ujar Iwan.

Pesan yang sama juga disampaikan Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto. Selain menghemat biaya bahan bakar, penggunaan LPG juga lebih ramah lingkungan. Ini sejalan dengan tuntutan dunia akan lingkungan yang bersih.

“Meskipun gas ini juga energi fosil, namun lebih bersih daripada bensin,” jelasnya.

Untuk menjamin ketersediaan LPG, Sugeng menyatakan akan melakukan pengecekan ketersediaan pasokan, baik di SPBBE maupun agen dan pangkalan. ●



Lima Tahun Berjalan, 60.859 Nelayan Sasaran Nikmati Paket Konversi BBM ke BBG

Pemerintah telah menuntaskan pendistribusian paket perdana Program Konversi BBM ke BBG untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran Tahun 2020. Kota Bengkulu menjadi lokasi pendistribusian paket perdana Program Konversi BBM ke BBG untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran Tahun 2020.



Pembagian paket konversi di Kota Bengkulu berlangsung pada Sabtu (28/11). Pada tahun 2020, Pemerintah menargetkan mendistribusikan 25.000 paket konkrit untuk nelayan sasaran di 17 provinsi, 42 kabupaten/kota dengan pagu anggaran Rp210,5 miliar. Wilayah terbanyak yang menerima paket perdana Program Konversi BBM ke BBG untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran tahun ini adalah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sebanyak 2.000 paket.

Awalnya untuk tahun 2020, direncanakan akan dibagikan 40.000 paket perdana. Namun lantaran pandemi Covid-19, dilakukan *recofusing* anggaran dan kegiatan ini ditiadakan. Dalam perjalanannya, DPR meminta agar program ini tetap dilaksanakan untuk membantu daya beli masyarakat dan diputuskan akan dibagikan sebanyak 25.000 paket perdana untuk nelayan.

Tahun 2020 ini merupakan tahun ke-5 pelaksanaan kegiatan pendistribusian paket konversi untuk nelayan oleh Ditjen Migas Kementerian ESDM. Hingga tahun 2019, telah dibagikan 60.859 paket perdana. Sedangkan tahun 2021, direncanakan akan dibagikan sebanyak 28.000 unit paket konversi di 20 provinsi.

Kebijakan terkini untuk menggantikan BBM ke BBG bagi nelayan dan petani tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran. LPG, sebagai salah satu bahan bakar yang sudah akrab di masyarakat untuk rumah tangga, memang berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan bakar mesin motor berdaya rendah.

Dirjen Migas Tutuka Ariadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Senin (16/11),



mengatakan, “Gas bumi tidak lagi dianggap sebagai komoditas ekspor semata tetapi sebagai modal pembangunan nasional. Penggunaan gas bumi domestik diprioritaskan untuk transportasi, rumah tangga dan pelanggan kecil, *lifting* minyak, industri pupuk, industri berbasis gas bumi, pembangkit listrik, dan industri berbahan bakar gas”.

Koordinasi lintas sektoral

Terkait hal itu, Pemerintah menggulirkan Program Konversi BBM ke BBG untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran. Program ini mendistribusikan paket perdana konversi BBM ke BBG. Paket perdana tersebut terdiri dari mesin penggerak, konverter kit, dua buah tabung LPG 3 kg serta aksesoris pendukung lainnya (*reducer, regulator, mixer* dan sebagainya).

Nelayan yang mendapat bantuan harus memenuhi kriteria, yaitu memiliki kartu identitas nelayan, menggunakan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan, memiliki kapal ukuran di bawah 5 *Gross Tonnage* (GT) yang daya mesinnya di bawah 13 *Horse Power* (HP), terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) serta belum pernah mendapat bantuan serupa dari Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah.

Pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk pelaksanaan program ini. Namun demikian, tentu diperlukan dukungan

dari pemerintah daerah setempat yang membidangi kelautan dan perikanan. Dukungan tersebut antara lain memastikan daftar nama calon penerima dan menyiapkan lokasi pembagian, serta sarana dan prasarana.

Oleh sebab itu, pelaksanaan pendistribusian paket perdana konversi BBM ke BBG untuk kapal nelayan sasaran dilakukan dengan menjalin koordinasi lintas sektoral terlebih dahulu. Koordinasi tersebut sudah mulai terlihat saat pra rakor. Pra rakor ini digelar di sejumlah kota/kabupaten, seperti di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (11/9). Rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait tata cara pendistribusian paket perdana konversi BBM ke BBG untuk kapal nelayan sasaran tahun 2020 di masing-masing wilayah.

Pra rakor ini merupakan kegiatan persiapan teknis rencana pendistribusian paket perdana Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan sehingga diharapkan pada saat pelaksanaan pendistribusian nantinya dapat berjalan dengan lancar dan hambatan yang kemungkinan terjadi dapat dimitigasi sejak dini.

Pertemuan di Kota Makassar tersebut menghadirkan sejumlah narasumber antara lain Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Akhmad Syakhroza, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur

Migas Alimuddin Baso, perwakilan dari Ditjen Migas Kementerian ESDM, Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pertamina. Hadir pula dalam acara ini, perwakilan 22 kabupaten/kota dari wilayah Kalimantan dan Sulawesi yang akan menerima paket perdana konversi BBM ke BBG untuk nelayan.

Pemerintah mengingatkan perlunya peningkatan sosialisasi manfaat konversi BBM ke BBG bagi masyarakat, khususnya nelayan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang baik mengenai kegiatan tersebut. Maka, sebelum nanti digunakan untuk melaut, para nelayan akan mendapatkan bimbingan teknis dari petugas terkait.

Tanpa adanya kesadaran dan pemahaman dari nelayan mengenai manfaat Konversi BBM ke BBG, maka kegiatan tidak akan berjalan lancar dan berpotensi terjadi kerawanan akibat ulah pihak-pihak yang merasa terusik dengan adanya program ini.

Pendistribusian paket tahun 2020 memiliki tantangan tersendiri di

tengah masa pandemi Covid-19. Karena itu, pendistribusiannya tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, seperti memakai masker, menjaga jarak fisik (*physical distancing*), dan pengecekan suhu tubuh nelayan.

Dinanti banyak nelayan

Konversi BBM ke BBG untuk kapal penangkap ikan bagi nelayan sasaran merupakan salah satu program yang mendukung diversifikasi energi. LPG dipilih sebagai energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan mudah didapat. Selain itu, menghemat pengeluaran bahan bakar mesin untuk melaut.

Program ini telah dinanti oleh banyak nelayan. Salah satunya Jon Hendri, seorang nelayan di Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Riau. Ayah satu anak yang sejak kecil telah bekerja sebagai nelayan tampak meneliti paket konversi BBM ke BBG untuk kapal penangkap ikan

bagi nelayan yang diletakkan di lokasi penyerahan simbolis oleh Kementerian ESDM untuk nelayan di desanya, Rabu (11/11). Bersama beberapa rekan nelayan, Jon Hendri (41), memperhatikan dan berdiskusi mengenai bantuan gratis ini.

“Saya sangat senang, akhirnya sebagian paket bantuan Pemerintah ini. Saya berharap selama dua tahun terakhir ini, semoga saya juga sebagian. Alhamdulillah tahun ini saya dapat,” ujarnya dengan nada riang.

Jon Hendri merupakan salah satu dari 667 nelayan di Kabupaten Kampar yang menerima paket perdana Konversi BBM ke BBG tahun 2020. Sebelumnya pada tahun 2018, 406 rekannya telah lebih dulu mendapat bantuan tersebut.

Harapan mendapatkan paket ini muncul ketika rumahnya didatangi petugas dari desa. Setelah disurvei, ia diminta menyerahkan persyaratan untuk mendapatkan paket perdana.

“Tidak susah kok syaratnya. Saya lengkapi semuanya,” tambahnya.

Dia sangat berharap sebagian paket konversi ini lantaran ingin berhemat biaya bahan bakar untuk melaut. Berdasarkan info rekan yang telah lebih dulu mendapatkan bantuan, penghematannya lebih dari 50%. Biasanya untuk sekali melaut, ia harus mengeluarkan biaya bahan bakar sekitar Rp30.000 untuk membeli 3 liter BBM atau Rp120.000 untuk empat hari melaut. Sedangkan menggunakan bahan bakar LPG 3 kg, hanya dibutuhkan satu tabung seharga Rp25.000.

“Hematnya banyak. Saya mau tabung selisihnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, biaya sekolah anak,” kata lelaki lulusan SD ini.

Tekad serupa juga diungkapkan Supriyadi (41) yang telah 22 tahun bekerja sebagai nelayan.

“Alhamdulillah ada bantuan ini. Kami masyarakat nelayan sangat terbantu. Nanti uang dari

penghematannya untuk biaya sekolah anak,” katanya.

Hal senada diungkapkan oleh Abdulrahman, nelayan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dirinya sangat gembira menggunakan bahan bakar LPG 3 kg untuk melaut karena sangat hemat. Biasanya tiap kali melaut, diperlukan BBM sebanyak 5 liter atau sekitar Rp50.000. Setelah menggunakan LPG 3 kg, per harinya hanya dibutuhkan biaya bahan bakar Rp 12.500 karena satu tabung LPG 3 kg yang dibeli seharga Rp25.000, dapat digunakan dua kali melaut.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Abdul Wahid memberikan apresiasi atas program Pemerintah karena membantu memperbaiki taraf ekonomi nelayan.

“Kementerian ESDM memikirkan cara untuk meringankan beban masyarakat. Nelayan selama ini menggunakan BBM dalam alat transportasi menangkap ikan. BBM agak mahal harganya. Kalau gas lebih murah sehingga penghematannya

bisa mencapai 50%,” ujar Abdul Wahid saat Pembagian simbolis paket perdana konversi BBM ke BBG untuk nelayan sasaran di Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Rabu (11/11).

Dengan adanya pembagian paket perdana ini, Abdul Wahid mengharapkan agar distribusi LPG untuk nelayan juga menjadi perhatian Pertamina agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat menyebabkan nelayan tidak dapat melaut.

Dalam kesempatan itu, Abdul Wahid juga mengingatkan nelayan agar menjaga kelestarian lingkungan dengan menangkap ikan secara wajar.

“Tangkap ikan sewajarnya saja, seperti nenek moyang kita. Jangan diracun ya,” pintanya.

Bupati Wajo Amran Mahmud mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan kepada petani dan nelayan, mengingat selama beberapa bulan terakhir pasokan BBM bersubsidi yang disalurkan ke masyarakat Wajo terbilang minim.

“Saya berharap dengan adanya bantuan ini, aktivitas perekonomian masyarakat mampu menghasilkan produksi yang lebih banyak lagi khususnya pada petani dan nelayan,” kata Amran di kesempatan berbeda.

Saat penyerahan simbolis paket perdana Program Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan dan Petani Sasaran Tahun 2020 di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Minggu (25/10), Anggota Komisi VII DPR Andi Yuliani Paris berpeson kepada penerima manfaat program ini untuk mengoptimalkan bantuan tersebut.

“Jaga barangnya, jangan dijual. Kalau saya dengar ada yang menjual barang (bantuan), saya tidak mau memperjuangkan lagi di DPR,” tegasnya. ●

”

Saya sangat senang, akhirnya sebagian paket bantuan Pemerintah ini. Saya berharap selama dua tahun terakhir ini, semoga saya juga sebagian. Alhamdulillah tahun ini saya dapat,”

Jon Hendri
Nelayan Kabupaten Kampar, penerima paket perdana konverter kit nelayan



Tanpa Kompromi, Ditjen Migas Berkomitmen Penuh Tegakan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) pada Kementerian ESDM tak berkompromi untuk mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Berbagai upaya dilakukan untuk menegakkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Dari sejumlah upaya yang dilakukan, penguatan dalam pengawasan pelaksanaannya memiliki peran krusial.

Penguatan yang dimaksud mencakup internalisasi nilai-nilai Reformasi Birokrasi (RB) yang terus-menerus dilakukan oleh para pimpinan di Ditjen Migas. Hal ini tampak dengan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi RB dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM kepada segenap pegawai pada 9 hingga 10 September 2020 lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Inspektorat V Kementerian ESDM yang diwakili oleh Auditor Pertama Irawan Dwi Sasongko menyampaikan pentingnya melakukan pengawasan dan peningkatan kualitas publik di dalam konteks pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Irawan mengungkapkan, pimpinan di lingkungan Kementerian ESDM berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*). Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah dengan dituangkan target lima Unit Kerja berpredikat WBK dan satu unit kerja berpredikat WBBM pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2020.

Mencakup enam area

Adapun sasaran pembangunan Zona Integritas meliputi enam area perubahan. Keenam area itu adalah manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari keenam area perubahan tersebut, maka Irwan menggarisbawahi terkait penguatan pengawasan. Salah satunya dengan pengendalian gratifikasi.

Gratifikasi dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Sesuai penjelasan Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Irwan kembali menambahkan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12B ayat (1) UU No. 20/2001 bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap bila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Lebih jauh dijelaskan bahwa unsur-unsur Gratifikasi yang dianggap suap ialah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Gratifikasi
- 2) Subjek: Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
- 3) Berhubungan dengan Jabatan
- 4) Berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
- 5) Tidak melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 (tiga puluh hari kerja) terhitung sejak gratifikasi tersebut diterima.

Namun demikian, apabila subjek telah melaporkan indikasi adanya gratifikasi kepada KPK paling lambat tiga puluh hari kerja sejak diterima gratifikasi tersebut, maka dapat menghapus ancaman tuntutan pidana.

Adapun ancaman pidana terkait bagi penerima gratifikasi telah diatur secara jelas pada Pasal 12 huruf B ayat (2) UU No. 20/2001. Bagi penerima Gratifikasi maka sanksi berupa Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta rupiah dan paling banyak Rp1 miliar.

Sementara itu, bagi setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan atau denda paling banyak Rp150 juta rupiah. Hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lalu apa yang harus dilakukan pejabat/pegawai apabila menghadapi situasi yang terdapat indikasi gratifikasi? Situasi pertama, gratifikasi dapat langsung ditolak apabila jelas dianggap suap dan diberikan secara langsung oleh pejabat/pegawai karena berhubungan dengan tugas dan jabatan.

Situasi kedua, apabila gratifikasi diterima tidak secara langsung dan dalam keadaan tidak dapat menolak atau ragu akan kualifikasi gratifikasi, maka subjek gratifikasi akan menghadapi dua hal. Kedua hal itu ialah wajib lapor kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) atau KPK atau tidak wajib lapor. Kondisi gratifikasi tidak wajib dilaporkan apabila memenuhi beberapa unsur sebagaimana penjelasan bagan 1.

Untuk gratifikasi yang wajib dilaporkan dalam konteks lingkungan Kementerian ESDM secara tegas juga telah diatur kriterianya dalam Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun

BAGAN 1. PERLAKUAN TERHADAP GRATIFIKASI



BAGAN 2.

Gratifikasi yg berkembang dalam praktek (Diatur dalam Permen ESDM) WAJIB DIPAPORKAN

1. Lelang di sektor energi dan sumber daya mineral atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan penerima;
2. Pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa terkait proses pengadaan barang/jasa yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan;
3. Pemberian layanan pada masyarakat;
4. Tugas dalam proses penyusunan anggaran;
5. Tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan/atau evaluasi serta pengawasan lainnya;
6. Pelaksanaan perjalanan dinas yang dibiayai oleh pihak ketiga dan/atau tidak diatur standar biaya;
7. Proses penerimaan/promosi/mutasi Pegawai;
8. Proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
9. Hari raya keagamaan, adat istiadat, atau tradisi dari pihak lain; dan / atau
10. Perjanjian kerja sama yang tengah dijalin.

2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian ESDM seperti pada bagan 2.

Dengan penguatan pengawasan, khususnya pengendalian gratifikasi, maka diharapkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM akan semakin nyata.

Secara definisi, ZI merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sedangkan WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik

Budaya kerja

Proses pembangunan Zona Integritas dimulai dari pencanangan, yakni dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh atau sebagian besar pegawai dan juga pernyataan komitmen telah siap membangun Zona Integritas. Tahap selanjutnya adalah Pembangunan Zona Integritas di mana K/L menetapkan unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM dan membangun unit kerja menuju WBK/WBBM.

Unit yang telah diusulkan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI). TPI kemudian melaporkan kepada pimpinan instansi untuk selanjutnya diajukan pengusulan ke Kemenpan RB. Tahap berikutnya adalah review oleh Tim Penilai Nasional (TPN) yang terdiri atas Kemenpan RB, KPK, dan juga Ombudsman RI. Apabila memenuhi kriteria dan penilaian, maka Menpan RB akan mengusulkan kepada instansi untuk menetapkan unit kerja sebagai WBK. Jika memenuhi penilaian dan



kriteria WBM, selanjutnya akan ditetapkan oleh Menpan RB.

Namun, pakta integritas pembangunan Zona Integritas menuju WKB/WBBM bukanlah slogan semata. Pakta integritas harus merasuk ke setiap marwah pegawai di lingkungan Ditjen Migas.

“Arahan pimpinan ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) sudah jelas bahwa RB dan ZI bukan hanya sekedar semangat untuk mendapat predikat dan dokumentasi yang baik. Tidak hanya itu, komitmen pimpinan menghendaki bahwa RB ZI ini harus menjadi budaya kerja,” tegas Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian ESDM Muhammad Rizwi J.H.

Terkait pembangunan Zona Integritas, Rizwi juga berpesan agar predikat WKB yang telah diraih pada tahun 2019, khususnya Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas, dapat menjadi contoh dan semangat bagi unit-unit yang lain.

“Pertama kali dari Direktorat Jenderal unit yang mendapat WKB adalah dari Direktorat Teknik dan Lingkungan. Ini merupakan satu hal yang positif dan perlu diikuti oleh unit-unit eselon 2 yang lain di Ditjen Migas,” lanjutnya.

Sebagai bentuk komitmen dan keseriusan dalam pembangunan ZI menuju WKB WBBM maka pada tahun 2020 ini Ditjen Migas akan mengikuti

evaluasi pelaksanaan ZI untuk predikat WBBM bagi Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas, dan predikat WKB bagi Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas dan Direktorat Pembinaan Program Migas.

Selanjutnya dalam rangka mendukung kesiapan pembangunan ZI menuju WKB/WBBM, dan persiapan Evaluasi RB yang akan dilaksanakan pada 28 September 2020, pimpinan juga memantau dan melakukan pendampingan secara langsung bagi unit yang mengusulkan untuk dilakukan penilaian WKB/WBBM.

Hasilnya tak tanggung-tanggung. Sebanyak 12 satuan kerja di lingkungan Kementerian ESDM meraih penghargaan Zona Integritas menuju WKB/WBBM Tahun 2020. Satu di antaranya adalah Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas.

Penghargaan Zona Integritas menuju WKB/WBBM Tahun 2020 diserahkan secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ESDM Prahoro Yulijanto Nurtjahyo, mewakili Menteri ESDM Arifin Tasrif, Senin (21/12/2020).

Prestasi ini tidak lepas dari arahan Menteri ESDM yang mendorong terus dilakukannya reformasi birokrasi melalui program-program perbaikan yang realistis. Pimpinan eselon 1

diminta untuk turun langsung dan memastikan bahwa perbaikan di setiap proses reformasi birokrasi tidak hanya di atas kertas, terlebih perlombaan. Namun, manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih prima.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin yang hadir secara virtual pada acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WKB/WBBM Tahun 2020 ini menegaskan, keberhasilan reformasi birokrasi harus didukung sumber daya manusia (SDM) aparatur yang tidak hanya unggul tapi juga berintegritas. Integritas lembaga maupun aparat harus ditegakkan sebagai formula untuk mencegah terjadinya korupsi yang sangat merugikan negara.

“Setiap aparatur sipil negara (ASN) harus memiliki komitmen untuk membangun budaya integritas. Tanpa integritas yang kuat, akan sulit bagi ASN untuk menghindari ancaman dan tekanan,” ujarnya.

Lebih lanjut Wapres mengatakan, predikat Zona Integritas menuju WKB/WBBM merupakan gerbang awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Ia optimis keberhasilan pembangunan Zona Integritas dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. ●

Motivasi: Tidak Akan Ada Pertumbuhan Tanpa Inovasi

Ditjen Migas menggelar Motivasi (Migas Ngobrol Tentang Inovasi) secara virtual pada Kamis (8/10). Acara ini membahas pentingnya inovasi bagi pertumbuhan.

Motivasi ini menghadirkan Guru Besar Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung (FTI ITB) Prof. Yassierli, S.T., M.T., Ph.D., CPE sebagai narasumber. Dalam paparannya, Prof. Yassierli menjelaskan inovasi di sektor publik perlu dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja dan kepuasan *stakeholder*.

“Fokus inovasi di sektor publik di antaranya peningkatan kinerja dengan efisiensi, produktivitas, lebih cepat, lebih aman, peningkatan kepuasan *stakeholders* sehingga tercipta *a better world*,” ungkapnya.

Inovasi sendiri dimaknai sebagai proses menemukan dan menerapkan ide-ide baru sehingga menghasilkan value yang lebih bermanfaat. Inovasi dapat berupa teknologi baru, kebijakan baru, cara atau metode

baru, model baru, produk atau jasa baru.

Prof. Yassierli menyampaikan beberapa fakta sejarah sebagai *lesson learn* bahwa perusahaan yang sebelumnya merupakan perusahaan besar, pada akhirnya jatuh akibat tidak terus melakukan inovasi. Di masa saat ini di mana situasi lingkungan yang semakin tidak terprediksi, ambigu, berubah dengan cepat, dan memiliki permasalahan yang semakin kompleks, menuntut kita untuk terus berinovasi.

“No sustainable growth tanpa inovasi,” tegasnya.

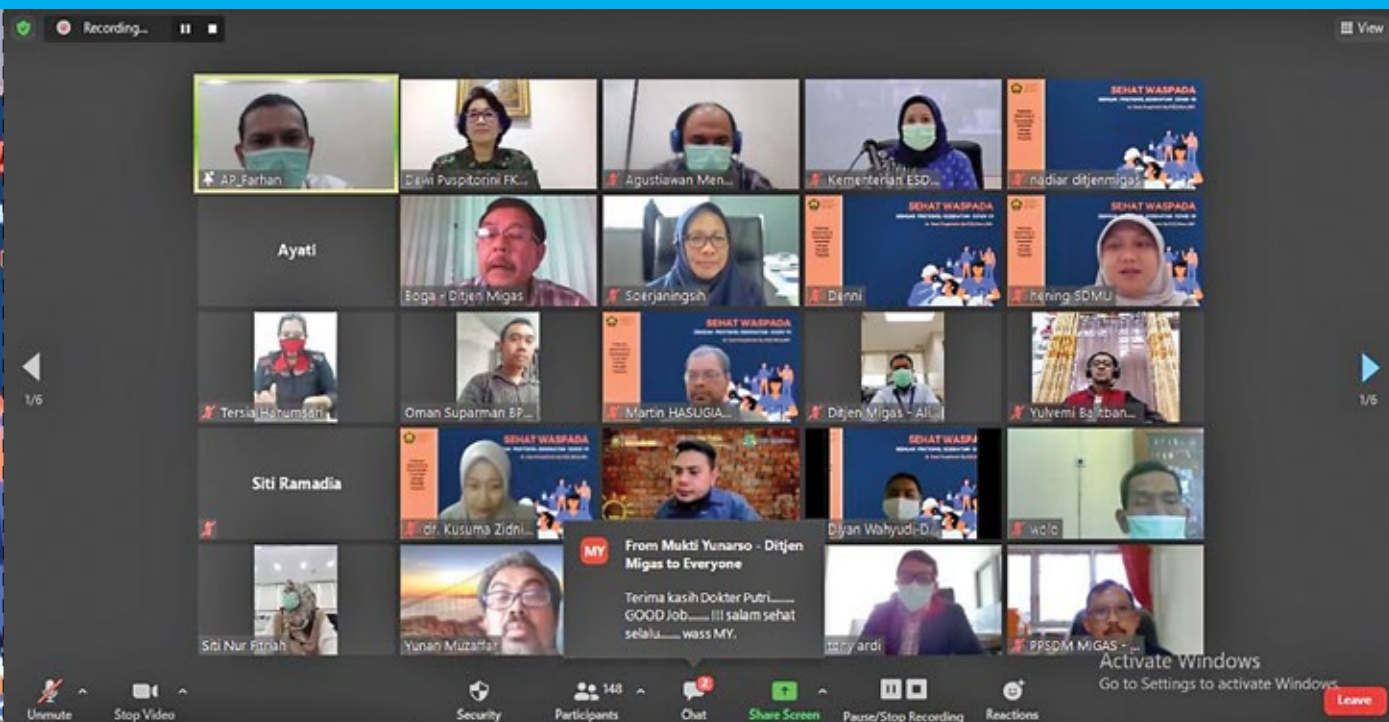
Inovasi bukan seberapa banyak riset dan pengembangan yang dilakukan tapi lebih kepada Sumber Daya Manusia (SDM) apa yang dimiliki dan bagaimana mereka dipimpin. Yang tak kalah penting adalah mengenali atau membuka potensi sejati setiap orang secara sistematis, penguasaan *tools*, dan tinggalkan budaya lama. Setidaknya diperlukan hal-hal berikut untuk membangun

SDM Inovatif antara lain kemampuan (*ability*), motivasi (*motivation*), dan kesempatan (*opportunity*).

Motivasi dihadiri secara *online* oleh para pegawai Ditjen Migas. Kegiatan ini merupakan satu dari rangkaian program *Innovation Series*. Program Motivasi ini terdiri dari lima rangkaian acara yang bertema inovasi. Motivasi selanjutnya akan hadir dengan tema-tema menarik, seperti inovasi di perusahaan *startup*, inovasi di Pemerintahan, inovasi ke Kementerian ESDM, dan ditutup dengan diskusi inovasi di Ditjen Migas.

Motivasi merupakan kegiatan yang digagas Agen Perubahan Ditjen Migas (AP Ditjen Migas) sebagai wujud nyata semangat perubahan di Ditjen Migas. Para pimpinan Ditjen Migas menyadari bahwa selain keteladanan pimpinan, maka diperlukan elemen penggerak perubahan baik dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan suatu organisasi.





Agen Perubahan & Klinik Ditjen Migas Adakan Webinar ‘Bangkit Lawan Corona dengan Protokol Covid-19’

Agen Perubahan & Klinik Ditjen Migas menggelar Webinar Bincang Kesehatan: Bangkit Lawan Corona dengan Protokol Covid-19, Selasa (22/12). Bertepatan dengan Peringatan Hari Ibu ke-92, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pegawai Ditjen Migas terhadap pandemi Covid-19. Selain itu, webinar ini juga merupakan upaya pencegahan dampak wabah Covid-19 di lingkungan Ditjen Migas.

Webinar Bincang Kesehatan: Bangkit Lawan Corona dengan Protokol Covid-19 menghadirkan narasumber Direktur Profesi Tenaga Kesehatan Rumah Sakit RSPAD Gatot Soebroto Brigjen TNI dr. Dewi Puspitorini

Sp.P.Mars, MH. Turut serta dalam webinar tersebut, Ketua Dharma Wanita Persatuan Ditjen Migas Nina Tutuka Ariadji.

Dalam sambutannya, Dirjen Migas Tutuka Ariadji berterima kasih atas kesediaan Dewi Puspitorini untuk berbagi ilmu dan pengalamannya.

“Narasumber kita ini seorang ibu yang memiliki prestasi dan dedikasi yang sangat luar biasa bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta,” katanya.

Lebih lanjut Tutuka mengungkapkan, dari beberapa kasus penularan virus Covid-19 yang terjadi pada pegawai Ditjen Migas, ada yang bergejala dan

sebaliknya. Salah seorang pegawai Ditjen Migas juga ada yang meninggal dunia karena memiliki penyakit penyerta (*comorbid*).

“Kami mengharapkan melalui webinar dapat diperoleh pengetahuan, langkah-langkah preventif apa yang perlu dilakukan dalam menekan wabah Covid-19,” tambah Tutuka.

Webinar ini membahas mengenai pedoman sehari-hari dan kewaspadaan *comorbid* sebagai penyakit penyerta ini. Dalam kesempatan tersebut, Dewi Puspitorini menyampaikan, Covid-19 masuk ke tubuh manusia melalui hidung, mulut, dan mata.

Gejala Covid-19 yang paling sering ditemui adalah demam, batuk kering, gangguan pernapasan, lemas, nyeri tenggorokan, nyeri kepala, nyeri otot, gangguan penciuman, gangguan pengecap, mual atau muntah, dan diare.

Penularan virus bisa melalui transmisi langsung, yaitu droplet percikan langsung dan transmisi tidak langsung di mana droplet jatuh ke permukaan benda yang kemudian disentuh dengan tangan. Selanjutnya, tangan tersebut menyentuh area wajah, seperti muka, hidung, dan mulut.

“Area muka harus diwaspadai karena menjadi pintu masuk virus. Oleh karenanya, kita harus menggunakan masker yang menutupi atas hidung hingga dagu. Kita tidak boleh kucek-kucek mata kalau belum cuci tangan,” jelasnya.

Setelah virus masuk ke dalam tubuh, Dewi memaparkan, hingga satu minggu pertama apabila dites PCR, maka akan menunjukkan positif. *Rapid test* antigen akan menunjukkan reaktif dan *rapid test* antibodi menunjukkan non reaktif. Setelah tujuh hari, antibodi mulai terbentuk hingga

12 hari. Pada periode ini, apabila dilakukan PCR bisa menunjukkan positif atau negatif. *Rapid test* antigen akan menunjukkan non reaktif, sedangkan *rapid test* antibodi menunjukkan reaktif.

Pada pekan ketiga, virus telah hilang, hasil PCR akan menunjukkan negatif, *rapid test* antigen non reaktif, sedangkan *rapid test* antibodi menunjukkan reaktif. Meski hasil PCR menunjukkan negatif, dapat terjadi infeksi berulang.

“Makanya, kalau sudah pernah terpapar, penyintas Covid harus tetap waspada,” tambahnya.

Mengenai penyakit penyerta Covid-19, berdasarkan data adalah hipertensi, diabetes, jantung, perokok, ginjal, asma dan kanker.

“Kalau kita ada hipertensi, gula, jantung, asma, kita harus hati-hati tapi jangan cemas berlebihan,” pesannya.

Covid-19 terutama menyerang usia 19-59 tahun yang termasuk produktif. Namun kematian banyak terjadi di penderita usia di atas 60 tahun karena daya tahan tubuh yang berkurang.

Mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir, Dewi mengingatkan agar masyarakat harus terus berdisiplin melaksanakan protokol kesehatan.

“Pakai masker dengan benar, jaga jarak dan rajin cuci tangan,” tegasnya.

Menurut Dewi, perkembangan Covid-19 sangat dinamis sehingga kita dituntut untuk terus belajar, termasuk perkembangan vaksinnya. Terkait vaksin, terdapat enam kelompok prioritas penerima vaksin, yaitu

1. Tenaga medis, paramedis *contact tracing*, dan pelayan publik mencakup TNI, Polri, dan aparat hukum.
2. Masyarakat, tokoh agama, daerah, kecamatan, dan RT/RW.
3. Semua tenaga pendidik mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.
4. Aparatur Pemerintah, baik di pusat maupun daerah serta legislatif.
5. Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
6. Masyarakat yang berusia 19-59 tahun.

Mengakhiri paparannya, Dewi menegaskan untuk tidak memberikan stigma negatif kepada penderita Covid-19. ●

Agen Perubahan Ditjen Migas Gelar Serangkaian ‘Motivasi’



HOSTED BY
**AGEN
PERUBAHAN**



Agen Perubahan Ditjen Migas menggelar serangkaian ‘Motivasi’ (Migas Ngobrol Tentang Inovasi). Kegiatan ini ditujukan untuk menanamkan semangat berinovasi kepada seluruh pegawai Ditjen Migas dan sekaligus wujud nyata semangat perubahan di Ditjen Migas.

Inovasi sendiri dimaknai sebagai proses menemukan dan menerapkan ide-ide baru sehingga menghasilkan *value* yang lebih bermanfaat.

Inovasi dapat berupa teknologi baru, kebijakan baru, cara atau metode baru, model baru, produk atau jasa baru.

‘Motivasi’ berlangsung secara daring. ‘Motivasi’ pertama diadakan pada Kamis (8/10) dengan menghadirkan narasumber Guru Besar Fakultas

Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Yassierli, S.T., M.T., Ph.D., CPE.

“Fokus inovasi di sektor publik di antaranya peningkatan kinerja dengan efisiensi, produktivitas, lebih cepat, lebih aman, peningkatan kepuasan *stakeholders* sehingga tercipta *a better world. No sustainable growth* tanpa inovasi,” ungkap Yassierli.

Yassierli menyampaikan beberapa *fakta sejarah sebagai lesson learn* bahwa perusahaan yang sebelumnya merupakan perusahaan besar, pada akhirnya jatuh akibat tidak terus melakukan inovasi. Inovasi bukan seberapa banyak riset dan pengembangan yang dilakukan,

tapi lebih kepada Sumber Daya Manusia (SDM) apa yang dimiliki dan bagaimana mereka dipimpin. Yang tak kalah penting adalah mengenali atau membuka potensi sejati setiap orang secara sistematis, penguasaan *tools*, dan tinggalkan budaya lama. Setidaknya, diperlukan hal-hal berikut untuk membangun SDM Inovatif, yakni kemampuan (*ability*), motivasi (*motivation*), dan kesempatan (*opportunity*).

‘Motivasi’ Series 2 berlangsung pada Jumat (13/11). ‘Motivasi’ kali ini menghadirkan Sekretaris Ditjen Migas Iwan Prasetya Adhi sebagai narasumber. Pada kesempatan tersebut, Iwan menyampaikan, salah satu nilai yang menjadi pedoman Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ditjen

Migas, Kementerian ESDM adalah Inovasi.

“Untuk semakin menumbuhkan semangat berinovasi dalam bekerja, Ditjen Migas telah merencanakan program *sharing knowledge* dan *sharing experience* melalui rangkaian acara yang bertema Inovasi,” ungkap Iwan.

‘Motivasi’ Series 2 juga menampilkan narasumber CEO sekaligus founder Pinhome Dayu Dara Permata. Pada acara tersebut, ia menyampaikan bahwa, untuk berinovasi kita harus punya visi ke depan dan perlu eksekusi untuk mencapai visi tersebut.

“Inovasi adalah eksekusi dari sebuah ide. Tanpa adanya aksi, inovasi hanyalah sebuah ide. Eksekusi adalah upaya untuk melakukan aksi guna mencapai tujuan,” ungkap Dayu.

Lebih jauh, Dayu menganalogikan pentingnya eksekusi sebuah ide untuk mencapai tujuan yang diharapkan sebagai sebuah perjalanan (*traveling*).

“Jadi, (seperti) kalau kita mau *traveling*, kita tahu rutenya, mau apa, dan kita jalankan rutenya untuk mencapai tujuan kita,” tambahnya.

Dalam sesi selanjutnya, Bernard Wijaya, CEO dari Sucor Sekuritas, juga mengingatkan pentingnya analisis sebelum mengeksekusi ide.

“Sebelum melakukan inovasi tentunya yang paling pertama kita lakukan adalah analisis. Kita harus tahu faktanya. Jangan sampai kita melakukan eksperimen tanpa melakukan analisis terlebih dahulu,” kata Bernard.

Lebih jauh Bernard juga menyampaikan tips untuk terus berinovasi. Pertama adalah *analyze* atau analisis data. Kedua, *identification*, sangat penting untuk mengidentifikasi perbaikan yang perlu dilakukan. Ketiga, *strategize*

dan *execute*, yakni membuat strategi dan eksekusi. Keempat, monitor, yakni melakukan *review* atas pelaksanaan ide.

Selanjutnya, ‘Motivasi’ Series 3 digelar pada Kamis (3/12). ‘Motivasi’ Series 3 ini menghadirkan dua narasumber ASN dari K/L. Keduanya mengabdikan di MAGMA Indonesia yang digagas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi, Kementerian ESDM, dan I-Pop, aplikasi buatan Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dr. Devy Kamil Syahbana, Kepala Sub Bidang Mitigasi Gunung Api Wilayah, PVMBG, Badan Geologi, Kementerian ESDM dalam ‘Motivasi’ Series 3 mengutarakan, MAGMA Indonesia merupakan aplikasi yang dibangun secara mandiri untuk memberikan pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi dan mitigasi kebencanaan geologi yang terjadi di wilayah Indonesia. Sistem ini dibangun dan dikembangkan sejak 2015 dan dapat diakses melalui web site <https://magma.vsi.esdm.go.id/> maupun aplikasi mobile.

Aplikasi multiplatform yang telah menyabet TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 dari Kemenpan-RB ini berisikan informasi dan rekomendasi kebencanaan geologi terintegrasi baik gunung api, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah yang disajikan kepada masyarakat secara kuasi-*realtime* dan interaktif.

“Dahulu, proses pelaporan yang panjang, data dikelola individu (tidak *sustainable*), diseminasi informasi berjalan lambat, tidak semua mendapat informasi, informasi sulit diperoleh dan sebagainya,” ujar Devy.

Tahapan pengembangan aplikasi ini, lanjutnya, dimulai dari menguasai proses bisnis, identifikasi isu, merinci

masalah tantangan, kekuatan dan peluang, tentukan yang akan dilakukan, membangun tim, membuat perencanaan (*milestone*) jangka pendek, menengah, dan panjang.

“Kuncinya mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Kita harus menguasai proses bisnis, hal apa yang mau kita ubah, kemudian identifikasi isunya, permasalahannya di mana,” ungkapnya.

Pada kesempatan sama, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kemendagri Erikson P. Manuhuruk memaparkan aplikasi I-Pop. Aplikasi ini berisi informasi peta kependudukan dan pencatatan sipil Indonesia atau disebut I-Pop (*Indonesia’s Population and Civil Registration Map*).

“Kalau kita mau membuat inovasi, sebaiknya bekerja sama dengan instansi yang terkait dengan kita sehingga inovasi dapat dibangun dalam kerangka pemikiran bersama dan meningkatkan kualitas pelayanan di masing-masing K/L,” imbuh Erikson.

Menanggapi paparan oleh para narasumber, salah satu peserta dari Bagian Logistik PEM Akamigas Cepu, Nur mengatakan alasan mengikuti acara ini adalah ingin belajar langsung dari narasumber yang telah menghasilkan terobosan.

“Alhamdulillah, narasumbernya keren-keren, terobosannya keren-keren ini mengenai informasi kebencanaan, satu lagi mengenai informasi statistik,” ungkap Nur.

Tidak hanya menggelar ‘Motivasi’ Series, Agen Perubahan juga bersinergi dengan unit-unit lain di Ditjen Migas dalam pelaksanaan kegiatan tertentu. Salah satunya Webinar Bincang Kesehatan: Bangkit Lawan Corona dengan Protokol Covid-19, Selasa (22/12). Acara yang berlangsung bertepatan dengan Peringatan Hari Ibu ke-92 ini diadakan atas kerja sama dengan Klinik Ditjen Migas. ●

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas Raih Penghargaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas berhasil meraih penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) Tahun 2020. Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas menjadi satu dari 12 satuan kerja di lingkungan Kementerian ESDM yang meraih penghargaan tersebut di tahun ini.

Penghargaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2020 diserahkan secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ESDM Prahoro Yulijanto Nurtjahyo, mewakili Menteri ESDM Arifin Tasrif, Senin (21/12).

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM merupakan langkah akselerasi guna mencapai sasaran reformasi birokrasi. Prestasi ini tidak lepas dari arahan Menteri ESDM yang mendorong terus dilakukannya reformasi birokrasi melalui program-program perbaikan yang realistis. Pimpinan eselon 1 diminta untuk turun langsung dan memastikan bahwa perbaikan di setiap proses reformasi birokrasi tidak hanya di atas kertas, namun

manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih prima.

Pelaksana Tugas Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih menyambut gembira capaian ini.

“Alhamdulillah. Senang dan bangga dengan kerja keras dan kerja sama seluruh pegawai di Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas yang dapat mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi. Semoga tahun depan dapat ditingkatkan menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani,” katanya.

Soerja melanjutkan, hal terpenting dari penghargaan ini adalah menjaga dan terus konsisten dalam komitmen bersama dan bisa menjadi motor penggerak mewujudkan Zona Integritas di lingkungan Ditjen Migas.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin yang hadir secara virtual pada acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2020 ini menegaskan, keberhasilan reformasi birokrasi harus didukung sumber daya manusia (SDM) aparatur yang tidak hanya unggul, tapi juga berintegritas. Integritas lembaga maupun aparat harus ditegakkan sebagai formula

untuk mencegah terjadinya korupsi yang sangat merugikan negara.

“Setiap aparatur sipil negara (ASN) harus memiliki komitmen untuk membangun budaya integritas. Tanpa integritas yang kuat, akan sulit bagi ASN untuk menghindari ancaman dan tekanan,” ujarnya.

Pada tahun ini, Kementerian ESDM mengusulkan 17 satuan kerja menuju WBK dan sembilan satuan kerja menuju WBBM. Setelah melalui proses penilaian evaluasi administrasi, presentasi, wawancara, serta verifikasi lapangan, sebanyak 10 satuan kerja layak memperoleh predikat WBK dan dua satuan kerja memperoleh predikat WBBM. Hingga saat ini, Kementerian ESDM telah memiliki 17 satuan kerja berpredikat WBK dan dua satuan kerja berpredikat WBBM. Keberhasilan tersebut diraih setelah mempertahankan predikat WBK selama dua tahun dan banyak melakukan perubahan nyata hingga layak diberikan predikat WBBM.

Bagi satuan kerja yang belum memperoleh predikat WBK/WBBM, Kementerian ESDM akan terus mengejar dan melakukan upaya lebih baik lagi dari yang ada saat ini. Apresiasi ini harus menjadi motivasi bagi unit kerja lainnya. ●



Ditjen Migas Konsisten Tekan Penyebaran Covid-19

Ditjen Migas konsisten menekan penyebaran Covid-19 atau Coronavirus Disease. Setidaknya, Ditjen Migas secara berkesinambungan mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan kerjanya.

Sejumlah kegiatan dilakukan guna mencegah penyebaran Covid-19 di Ditjen Migas atau klaster perkantoran. Salah satunya adalah membagikan *medical kit* untuk kelima kalinya pada Kamis (12/11). Pembagian *medical kit* ini tidak terbatas untuk pegawai, tetapi juga keluarga inti, seperti suami, istri, dan anak. Selain itu, paket *medical kit* tidak hanya dibagikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga tenaga penunjang yang bekerja di lingkungan Ditjen Migas.

“*Medical kit* ini diharapkan bisa membantu menjaga kesehatan pegawai dan keluarga. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa bekerja dengan baik,” kata Dirjen Migas Tutuka Ariadji di Gedung Ibnu Sutowo.

Pembagian *medical kit* telah dilakukan Ditjen Migas sejak Maret 2020. Isi paket yang dibagikan ini disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga. Paket *medical kit* kelima ini terdiri dari susu, madu, vitamin, masker, *hand sanitizer* dan sebagainya.

Selain pembagian *medical kit*, Ditjen Migas juga telah menyelenggarakan rapid test untuk para pegawai sebanyak dua kali. Tambah lagi, ditetapkan pedoman sistem kerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Migas.

Tak hanya *rapid test*, Ditjen Migas juga menyelenggarakan *swab* masal bagi seluruh pegawai dan mitra kerja yang berada di lingkungan Ditjen Migas selama tiga hari, yaitu 25, 28, dan 29 September 2020 di Lobi Ditjen Migas.

Bekerja sama dengan RS Mitra Keluarga Kalideres, penyelenggaraan *swab* masal ini merupakan tindak lanjut instruksi pimpinan Kementerian ESDM agar unit-unit eselon I secara serentak melakukan *swab* masal guna menekan penyebaran Covid-19.

Sekretaris Ditjen Migas Iwan Prasetya Adhi mengatakan, *swab* massal akan dilakukan secara periodik, setiap dua bulan. *Swab* wajib dilakukan para pegawai dan bagi mereka yang tidak menginginkannya, akan diberikan sanksi.

Selama masa pandemi ini, beberapa pegawai di lingkungan Ditjen Migas dinyatakan terpapar Covid-19. Meski persentasenya terbilang kecil, namun

Ditjen Migas tetap melakukan *tracing* menyeluruh terhadap pegawai tersebut dan orang-orang di sekitarnya.

Upaya lain yang dilakukan oleh Ditjen Migas guna mencegah penyebaran Covid-19 ialah membatasi pegawai yang masuk kantor (*work from office/WFO*) maksimal 25%, serta mewajibkan pegawai melaksanakan protokol kesehatan di manapun berada, seperti menggunakan masker yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan, rajin mencuci tangan, *physical distancing*, dan melarang pegawai yang kurang sehat datang ke kantor. Pegawai yang hendak memasuki gedung pun diukur suhu tubuhnya.

Untuk pegawai yang akan bepergian ke luar kota melaksanakan tugas, diwajibkan melakukan *rapid test*, diberikan masker N95 atau setara, dan *face shield*. Aturan ini tidak hanya berlaku bagi pegawai yang menggunakan transportasi udara, tetapi juga transportasi darat. Rapid test sendiri dilakukan oleh tim dokter di Klinik Utama Ditjen Migas. Sepulang dari luar kota, pegawai tersebut diwajibkan untuk *work from home* (WFH) selama empat hingga lima hari dan melakukan *rapid test* lagi. ●

Buka Opsi Skema KPBU, Ditjen Migas Gelar Konsultasi Publik Jargas

Ditjen Migas menggelar Konsultasi Publik Jargas dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Kota Medan, Rabu (19/8). Skema KPBU diyakini dapat mendukung pencapaian target pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas).

Konsultasi publik dihadiri oleh Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Litigasi dan Keamanan Obyek Vital Nasional Yurod Saleh, Plt. Walikota Medan yang diwakili Kepala Bappeda Irwan Ritonga, narasumber dari Ditjen Migas dan Lemigas Kementerian ESDM. Kegiatan ini juga

diikuti secara virtual oleh Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Yudho Dwinanda Priaadi, narasumber dari Bappenas dan Kemenkeu, camat dan lurah di Kota Medan.

Hingga tahun 2024, Pemerintah menargetkan membangun jargas sebanyak 4 juta sambungan rumah (SR) dengan skema pembiayaannya melalui APBN, KPBU, dan BUMN. Di sisi lain, dengan menggunakan anggaran negara, hingga 2019 baru terbangun 400.269 SR.

Jargas dengan dana APBN dibangun sejak 2009, terutama tersebar di wilayah Pulau Sumatera, Jawa,

Kalimantan, Sulawesi dan Papua Barat. Jargas yang telah terbangun ini masih jauh dari harapan karena dalam *spot-spot* kecil dalam satu daerah. Hal ini karena kendala terbatasnya APBN. Padahal, biaya pembangunan jargas yang notabene merupakan infrastruktur publik memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Dengan kondisi tersebut, skema pembiayaan melalui APBN, KPBU, dan BUMN diharapkan dapat mempercepat target pembangunan jargas di tahun-tahun mendatang. Pembangunan jargas secara masif dapat mengurangi beban subsidi LPG dan penyediaan energi yang lebih bersih, aman, dan efisien kepada masyarakat. Target pembangunan jargas sebanyak 4 juta SR ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Harapan Pemerintah, dengan keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui Kerja Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pembangunan jargas akan semakin masif dan mencapai target sesuai RPJMN,” tutur Alimuddin dalam kesempatan tersebut.

“Konsultasi publik ini untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas KPBU guna mendiskusikan penjelasan dan penjabaran terkait dengan rencana KPBU sehingga diperoleh hasil penerimaan tanggapan dan masukan dari pemangku kepentingan dan evaluasi terhadap hasil yang didapat dari Konsultasi Publik dan implementasinya dalam KPBU,” tambahnya. ●



Jajaki Kerja Sama Baru, The 11th Indonesia-Korea Energy Forum Digelar Virtual

Indonesia dan Korea Selatan rutin menggelar pertemuan bilateral bidang energi setiap tahunnya yang bertajuk *Indonesia-Korea Energy Forum* (IKEF). Tahun ini, acara tersebut dilakukan secara virtual mengingat pandemi Covid-19.

Pertemuan bilateral tersebut dilaksanakan guna menjajaki potensi kerja sama baru serta menindaklanjuti proyek kerja sama yang telah berlangsung. Tahun ini merupakan gelaran *Indonesia-Korea Energy Forum ke-11. The 11th Indonesia-Korea Energy Forum* berlangsung pada Rabu (9/9).

The 11th Indonesia-Korea Energy Forum dibuka oleh Yong J. Joo, *Deputy Minister for Energy and Resources, Ministry of Trade, Industry and Energy*

(MOTIE) Korea selaku Ketua Delegasi Korea Selatan. Delegasi Indonesia sendiri dipimpin oleh Yudo Dwinanda Priaadi, Staf Ahli Menteri Bidang Perencanaan Strategis, Kementerian ESDM. IKEF ke-11 dilaksanakan dalam tiga sesi meliputi subsektor kelistrikan dan energi baru terbarukan, minyak dan gas bumi serta kerja sama saling menguntungkan.

Dalam sambutannya, Yudo Dwinanda Priaadi mengungkapkan, konsumsi listrik dan bahan bakar di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan lebih rendah dari proyeksi. Apalagi, harga minyak Indonesia yang berada di bawah asumsi APBN akan berdampak pada target penerimaan negara.

Meski demikian, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian

ESDM telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19, terutama yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Sejumlah upaya tersebut antara lain keringanan tagihan listrik untuk rumah tangga, usaha mikro, dan industri kecil. Di sisi investor, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai bentuk dan fleksibilitas kontrak bagi hasil atau *Production Sharing Cost* (PSC).

Di sesi kerja sama bilateral, Indonesia dan Korea membahas peningkatan kerja sama subsektor pertambangan, sistem manajemen keselamatan energi, litbang, dan pembangunan sumber daya manusia. ●



Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-75 Momentum Bangkitkan Sektor ESDM



Tanggal 28 September diperingati sebagai Hari Pertambangan dan Energi (HPE). Meski berlangsung secara virtual karena pandemi Covid-19, HPE ke-75 tahun ini bisa menjadi momentum membangkitkan sektor ESDM.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam sambutannya untuk memperingati HPE ke-75 melalui *video conference*. Ia menyatakan, HPE bisa dijadikan pijakan untuk terus bekerja membangun sektor ESDM lebih baik, progresif, dan lebih cepat lagi.

Arifin menuturkan, mengusung tema 'Bangkit untuk Indonesia Maju', Hari Jadi Pertambangan dan Energi tahun ini merefleksikan semangat insan pertambangan dan energi untuk bangkit bersama menghadapi tantangan pandemi.

"Meski target tahun ini sedikit terkoreksi, saya harap tidak akan mengendurkan semangat untuk tetap memberikan yang terbaik, terus menorehkan prestasi, mewujudkan Indonesia Maju," lanjutnya.

"Tantangan yang membuat kita berpikir lebih kreatif dan inovatif dalam mengawal dan melakukan mitigasi sektor energi di tengah pandemi. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan semangat agar bisa melalui masa yang sulit ini," pesan Arifin.

Arifin mengakui, turunnya permintaan energi telah menyebabkan lesunya beberapa komoditas di pasar global. Namun, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah guna mengerek kembali permintaan dan daya beli masyarakat. Salah satunya

melalui stimulus tarif listrik yang diberikan kepada lebih dari 33 juta pelanggan PLN, sesuai ketentuan yang ditetapkan.

"Stimulus ekonomi ini bersifat sementara, menjadi pengejawantahan dari wujud kehadiran negara bagi masyarakat terdampak," tegas Arifin.

Selama setahun terakhir, berbagai catatan kinerja juga telah dicapai oleh Kementerian ESDM antara lain ditetapkannya UU Minerba baru, harga gas industri turun menjadi US\$6 per MMBTU, regulasi kontrak migas yang lebih fleksibel, hingga regulasi harga EBT yang siap diterbitkan. Meneruskan jejak keberhasilan penerapan B30, Kementerian ESDM juga tengah mengkaji penerapan B40 yang diharapkan selesai akhir tahun ini. ●

Pandemi Covid-19 Tak Surutkan Minat Mahasiswa STT Migas Balikpapan Ikuti Migas Goes to Campus

Ditjen Migas menyelenggarakan acara *Migas Goes to Campus* (MGTC) secara virtual Kamis (5/11). Pandemi Covid-19 tak mengurangi antusiasme mahasiswa/i Sekolah Tinggi Teknologi Migas Balikpapan (STT Migas Balikpapan) untuk mengikuti acara penyelenggaraan MGTC ke 16 tersebut.

MGTC kali ini mengusung tema "Ditjen Migas Hadir Untuk Borneo". Sebanyak kurang-lebih 300 mahasiswa/i STT Migas Balikpapan mengikuti acara yang berlangsung selama sekitar tiga jam ini. Dalam MGTC ini, terdapat lima narasumber yang memberikan paparannya masing-masing.

Dalam sambutannya, Ketua STT Migas Balikpapan Lukman menyambut gembira penyelenggaraan MGTC dan mengharapkan para mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan.

"Kegiatan ini sangat berguna bagi anak-anak kami karena banyak pengetahuan yang bisa diperoleh dari kegiatan ini. Apalagi menampilkan para pejabat Ditjen Migas sebagai narasumber," tambahnya.

Lukman juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Ditjen Migas yang telah melibatkan STT Migas Balikpapan dalam penyelenggaraan acara ini.

Diskusi pada MGTC ini dibagi dua sesi. Sesi pertama menampilkan narasumber Sekretaris Ditjen Migas Iwan Prasetya Adhi dan Kasubdit Pengembangan Wilayah Kerja Migas Konvensional Ardhi Krisnanto.

Dalam paparannya yang berjudul "Mengenal Kelembagaan Migas dan

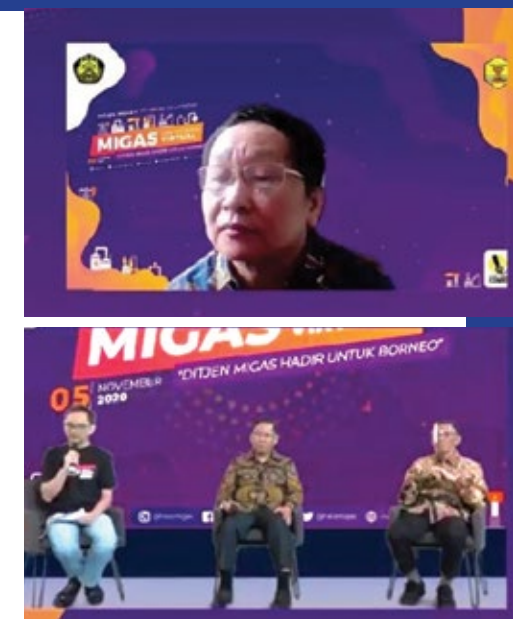
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) c.q Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi", Iwan Prasetya Adhi menyampaikan, Ditjen Migas merupakan salah satu unit utama di bawah Kementerian ESDM yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

"Ditjen Migas utamanya bertugas membuat kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan di sektor hulu dan hilir migas," katanya.

Sementara itu, Ardhi Krisnanto menyampaikan paparan mengenai optimalisasi kegiatan usaha hulu migas. Dijelaskan, sesuai Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dinyatakan bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

Dalam sesi kedua, diskusi menampilkan tiga narasumber, yaitu Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Adhi Wibowo, dan Dosen STT Balikpapan Andry Halim.

Salah satu materi paparan yang disajikan oleh Alimuddin Baso adalah jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas). Ia menjelaskan, sejak tahun 2009, Pemerintah melaksanakan pembangunan jargas. Pembangunan jargas merupakan kebijakan Pemerintah



untuk membangun kedaulatan dan kemandirian di bidang energi.

Selain itu, jargas merupakan program diversifikasi energi sebagai upaya pemanfaatan sumber energi dalam negeri dengan penyediaan gas bumi untuk rumah tangga.

"Masyarakat yang tinggal dekat dengan sumber gas, tentu harus mendapat manfaat dari gas tersebut. Pemerintah menginisiasi agar masyarakat mendapatkan energi murah, antara lain dengan pembangunan jargas," ungkap Alimuddin.

Khusus di Pulau Kalimantan, hingga 2019 telah terbangun 71.935 SR. Sedangkan untuk tahun 2020, total jargas yang akan dibangun di Kalimantan sebanyak 25.812 SR. Untuk Kota Balikpapan, jargas dibangun tahun 2016 sebanyak 3.849 SR dan tahun 2018 sebanyak 5.000 SR dan tahun 2020 sebanyak 6.963 SR.

Migas Goes to Campus sendiri merupakan agenda rutin Ditjen Migas KESDM sejak tahun 2015 dan telah diselenggarakan di berbagai universitas seperti Universitas Gajah Mada dan Universitas Indonesia dan ITS. MGTC diharapkan dapat menjadi jembatan Pemerintah dengan civitas akademisi untuk menentukan kebijakan yang baik dan adil dalam pengelolaan migas Indonesia. ●

Ditjen Migas Kedatangan Enam CPNS Baru

Ditjen Migas mendapat tambahan enam Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun penerimaan 2019. Keenam CPNS tersebut merupakan bagian dari 50 peserta yang telah lulus melalui seleksi ketat untuk ditempatkan di Kementerian ESDM.

Seleksi tersebut mencakup tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) di belasan kota/kabupaten di Indonesia. Pelaksanaan SKB tersebut juga menerapkan protokol kesehatan ketat mengacu

kepada kebijakan Panitia Nasional Penerimaan CPNS. Setiap peserta dan panitia penerimaan CPNS wajib menggunakan masker, *face shield* serta dalam kondisi sehat, yang ditandai dengan suhu tubuh tidak melebihi 37,3 °C. Hasil akhir seleksi tertuang dalam pengumuman Nomor 42.Pm/72/SJN.P/2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahril.

Bagi peserta yang dinyatakan lulus, wajib melakukan pemberkasan

kelengkapan pengangkatan CPNS Kementerian ESDM dengan mengunggah dokumen persyaratan secara elektronik dengan cara log in pada akun SSCN masing-masing dokumen persyaratan pada tanggal 6-11 November 2020.

Selain itu, melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas usul pengangkatan CPNS Kementerian ESDM tahun 2019 secara daring melalui *zoom meeting* pada tanggal 12 November 2020.

Hanya peserta yang lulus seleksi dan memenuhi persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Peserta yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai kelengkapan dokumen untuk pemberkasan pengangkatan CPNS Kementerian ESDM dapat menghubungi 081218010700. Selengkapnya mengenai hasil seleksi ini dapat mengakses cpns.esdm.go.id. ●

Ditjen Migas Anugerahkan 88 Penghargaan Keselamatan Migas

Ditjen Migas menganugerahkan 88 penghargaan dalam Penghargaan Keselamatan Migas 2020. Digelar rutin setiap tahun, Penghargaan Keselamatan Migas merupakan apresiasi kepada BU/BUT yang memiliki prestasi dalam menjaga keselamatan migas.

Tahun ini, Penghargaan Keselamatan Migas berlangsung secara virtual pada Selasa (3/11) karena pandemi Covid-19. Acara ini juga disiarkan secara langsung di *official* akun youtube Ditjen Migas/Halo Migas.

“Pemberian Penghargaan Keselamatan Migas ini merupakan apresiasi terhadap keberhasilan suatu perusahaan yaitu KKKS dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Hilir dalam menjamin kelangsungan keselamatan kerja di kegiatan usaha migas,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas Ego Syahril dalam laporannya pada acara tersebut.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam arahannya menegaskan,

komitmen menjamin keselamatan migas harus dimulai dari pimpinan BU/BUT untuk menempatkan keselamatan sebagai budaya yang menjadi bagian dari setiap lingkup pekerjaan.

“Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) pada BU/BUT adalah satu keharusan. Badan usaha bidang migas, baik hulu maupun hilir, juga sudah seharusnya memiliki suatu sistem manajemen keselamatan yang tidak hanya dipahami oleh *top management*, tetapi juga oleh para pekerja di lapangan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Arifin mengucapkan selamat kepada badan usaha yang mendapatkan penghargaan ini. “Kami berharap prestasi ini dipertahankan dan disampaikan ke pekerja di lapangan Untuk menyemangati mereka,” tambahnya.

Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi tahun 2020 ini diberikan untuk dua kategori, yaitu

Kategori “Tanpa Kehilangan Jam Kerja Sebagai Akibat Kecelakaan” atau PATRA NIRBHAYA dan Kategori “Pembinaan Keselamatan Migas” atau PATRA KARYA.

Pada tahun 2020 ini, penerima Penghargaan PATRA NIRBHAYA sebanyak 72 perusahaan dan penghargaan PATRA KARYA sebanyak 16 perusahaan yang terdiri dari:

1. Patra Karya

- Patra Karya Raksa Tama sebanyak 8 perusahaan.
- Patra Karya Raksa Madya sebanyak 7 perusahaan.
- Patra Karya Raksa Pratama sebanyak 1 perusahaan.

2. Patra Nirbhaya

- Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha sebanyak 22 perusahaan.
- Patra Nirbhaya Karya Utama sebanyak 20 perusahaan.
- Patra Nirbhaya Karya Madya sebanyak 17 perusahaan.
- Patra Nirbhaya Karya Pratama sebanyak 13 perusahaan.

PENGUMUMAN

HASIL AKHIR SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
FORMASI TAHUN 2019





PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN KESELAMATAN MIGAS 2020



Selengkapnya perusahaan penerima penghargaan sebagai berikut:

A. Patra Karya Raksa Tama

1. ExxonMobil Cepu Limited
2. PT Pertamina (Persero) Refinery Unit IV Cilacap
3. PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan
4. PT Badak NGL
5. PT. Pertamina (persero) Refinery Unit III Plaju
6. PT Jakarta Tank Terminal
7. PT Pertamina Gas Wilayah Timur
8. PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Dumai

B. Patra Karya Raksa Madya

1. JOB Pertamina – Medco E&P Tomori Sulawesi
2. PT Donggi Senoro LNG
3. PT Transportasi Gas Indonesia
4. PT. Pertamina (Persero) RU VII Kasim
5. PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V
6. PT Pertamina (persero) Marketing Operation Region IV
7. PT Perusahaan Gas Negara Tbk - Gas Distribution Management Regional I

C. Patra Karya Raksa Pratama

1. PT. Maspion Energy Mitratama

D. Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha

1. JOB Pertamina - Medco E&P Tomori Sulawesi
2. ExxonMobil Cepu Limited
3. PetroChina International Jabung Ltd.
4. PT Pertamina Hulu Mahakam
5. PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore
6. PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan
7. PT Badak NGL
8. PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju
9. PT Pertamina (Persero) Refinery Unit IV Cilacap
10. PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Dumai
11. PT Donggi Senoro LNG
12. PT. Pertamina (Persero) RU VII Kasim
13. PT Bina Bangun Wibawa Mukti (Perseroda)
14. PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V
15. PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region IV
16. PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I
17. PT Perusahaan Gas Negara Tbk - Gas Distribution Management Regional I
18. PT Pertamina Gas Wilayah Timur

19. PT Transportasi Gas Indonesia
20. PT Pertamina Gas Project Management
21. PT Jakarta Tank Terminal
22. PT. Maspion Energy Mitratama

E. Patra Nirbhaya Karya Utama

1. PT Pertamina EP Cepu ADK
2. BP Berau, Ltd.
3. Kangean Energy Indonesia Ltd.
4. EMP Bentu Ltd.
5. Petrogas (Basin) Ltd
6. SAKA Indonesia Pangkah Ltd.
7. JOB Pertamina - Medco E&P Simenggaris
8. PT SPR Langgak
9. Kilang PPSDM ESDM Migas Cepu
10. PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region III
11. PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region II
12. PT Sumber Petrindo Perkasa
13. PT Perusahaan Gas Negara Tbk - Gas Distribution Management Regional II
14. PT Pertamina Gas Wilayah Barat
15. PT Perusahaan Gas Negara Tbk - Gas Transmission Management
16. PT Perusahaan Gas Negara Tbk - Gas Distribution Management Regional III
17. PT Kalimantan Jawa Gas
18. PT Mitra Energi Gas Sumatera

19. PT Perta Arun Gas
20. PT Orbit Terminal Merak

F. Patra Nirbhaya Karya Madya

1. EMP Malacca Strait S.A
2. Husky CNOOC Madura Limited
3. PT Pertamina EP Asset 5
4. Montd'Or Oil Tungkal Ltd
5. PT Pertamina EP Cepu
6. PT Medco E&P Lematang
7. Petronas Carigali Muriah Ltd.
8. Petronas Carigali Ketapang II Ltd.
9. Chevron Makassar Ltd.
10. PT Perta-Samtan Gas
11. PT. Titis Sampurna
12. PT. Pertamina (Persero) - RDMP Balikpapan & Lawe-Lawe
13. PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VII
14. PT Nusantara Regas
15. PT. Bayu Buana Gemilang - Area Barat
16. PT. Bayu Buana Gemilang - Area Timur
17. PT Perusahaan Gas Negara Tbk - Project Management Office
18. PT. Optima Sinergi Comvestama

G. Patra Nirbhaya Karya Pratama

1. PT Pertamina Hulu Energi Aban
2. PT Visi Multi Artha
3. PT Pertamina Hulu Energi Tuban East Java
4. Mandala Energy Lemang Pte. Ltd.
5. PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang
6. PT Gasuma Federal Indonesia
7. PT Trans Pacific Petrochemical Indotama
8. PT Surya Esa Perkasa Tbk
9. PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII
10. PT Energasindo Heksa Karya
11. PT Gagas Energi Indonesia
12. PT AKR Corporindo Tbk
13. PT PGN LNG Indonesia. (TW)

Dalam ajang Penghargaan Keselamatan Migas Tahun 2020, Ditjen Migas juga meluncurkan Buku

Atlas Keselamatan Migas Volume 3 Tahun 2020. Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Adhi Wibowo mengatakan, buku yang disusun Ditjen Migas dan Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas (TIPKM) tersebut merupakan suatu refleksi bahwa kecelakaan mengintai kapan saja. Untuk itu, yang diperlukan adalah pembenahan, peningkatan, serta kesiagaan dalam melaksanakan tanggung jawab keselamatan migas.

Buku Atlas Keselamatan Migas diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pelaku usaha migas dalam meningkatkan aspek keselamatan migas. Bagi yang berminat, dapat mengunduh di [website migas.esdm.go.id](http://website.migas.esdm.go.id).





Tutuka Ariadji Resmi Duduki Jabatan Dirjen Migas Baru

Prof. Ir. Tutuka Ariadji, M.Sc., Ph.D., IPU resmi menduduki jabatan Dirjen Migas baru. Ia mengisi kursi jabatan tersebut setelah lebih dari setahun kosong dan diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Sejumlah tantangan telah menanti Tutuka Ariadji dalam menunaikan amanah yang diembannya, terlebih di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang.

Menteri ESDM Arifin Tasrif melantik dan mengambil sumpah Tutuka Ariadji sebagai Dirjen Migas yang baru di Ruang Sarulla, Jumat (6/11). Pada kesempatan yang sama, Menteri ESDM juga melantik dan mengambil sumpah Dr. Ir. Dadan Kusdiana M.Sc., sebagai Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) serta Maompang

Harahap S.T., M.M, sebagai Inspektur I Kementerian ESDM.

“Saya ucapkan selamat dengan harapan saudara dapat menjalankan amanah ini dengan integritas yang tinggi sesuai sumpah jabatan dan pakta integritas yang telah saudara ucapkan,” ujar Menteri ESDM mengawali sambutannya.



Lebih lanjut dia mengatakan, selaku Dirjen Migas, Tutuka Ariadji diminta membantu mewujudkan beberapa program strategis Kementerian ESDM. Tugas tersebut adalah mewujudkan program jangka panjang target produksi 1 juta barel. Caranya antara lain dengan mempertahankan tingkat produksi eksisting yang tinggi, transformasi sumber daya ke produksi, mempercepat EOR dan melakukan eksplorasi secara masif untuk penemuan baru.

“Sebagai gambaran, rata-rata realisasi produksi migas sampai dengan September 2020 sebanyak 1.712 MBOEPD atau 101% dari target APBN-P, terdiri dari *lifting* minyak sebesar 698 MBOPD dan *lifting* gas sebesar 1.064 MBOEPD,” papar Arifin.

Tugas lainnya adalah mengupayakan pengurangan impor BBM dan LPG untuk meringankan beban devisa negara, terus mendorong untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kilang dan jargas,

serta pemanfaatan EBT secara masif diantara biodiesel dan Dimetil Eter (DME).

“Selain itu, mewujudkan kemandirian energi melalui pembangunan kilang dan petrokimia,” ucap Menteri ESDM.

Terakhir, melaksanakan kebijakan penyesuaian harga gas bumi sebagai upaya peningkatan pemanfaatan gas dalam negeri dan percepatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan daya saing nasional.

Profil Singkat Dirjen Migas Tutuka Ariadji



Tutuka Ariadji lahir di Solo, 26 Agustus 1964. Ia menyelesaikan S1 Teknik Perminyakan ITB dan menempuh jenjang S2 dan S3 Teknik Perminyakan di Texas A&M University.

Setelah lulus kuliah di AS, ia kembali ke Indonesia dan mengabdikan di ITB. Sejak itu, Tutuka membangun kariernya di kampus itu. Awalnya, Tutuka menjadi Asisten Pembantu Rektor Bidang Akademik ITB pada 1997-2001. Lalu, ia diangkat menjadi Sekretaris Departemen TM ITB pada 2003.

Kemudian, ia menjadi Sekretaris Prodi S2/S3 TM ITB periode 2005-2006. Kariernya pun semakin menjanjikan di ITB. Tutuka ditunjuk menjadi Direktur Politeknik

Balikipan pada 2006 hingga 2008. Setelah itu, ia menjadi Sekretaris Prodi Pasca Sarjana TM ITB pada 2009-2010.

Selanjutnya, ayah empat anak ini menempati posisi Wakil Dekan Akademik Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB pada 2011-2014. Jabatan terakhir Tutuka adalah Ketua Forum Guru Besar ITB.

Di luar pekerjaannya di ITB, ia juga mengikuti beberapa organisasi. Tutuka pernah mengikuti Kepanitiaan Simposium dan Kongres IATMI periode 1989-1990, 2002-2004, 2004-2006. Kemudian, ia juga masuk dalam Dewan Pakar IATMI periode 2010-2012 dan 2012-2014.

Pehobi lari ini juga sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Pemantauan Peningkatan Produksi Migas-Kementerian ESDM pada 2011-2012, Anggota Majelis Layanan Insinyur-Persatuan Insinyur Indonesia (MLIPII), dan Ketua Tim Persiapan Program Profesi Insinyur ITB pada 2016.

Tutuka terlibat dalam banyak proyek yang berkaitan dengan migas. Beberapa di antaranya seperti *joint study* CO₂-EOR (2019), pekerjaan swakelola pengumpulan data bawah permukaan dan evaluasi sumberdaya dan cadangan (2019) dan mendesain konsep perizinan pengusahaan hulu minyak dan gas bumi yang efektif dan efisien dalam mendukung Percepatan Proyek Strategis Nasional (2018). ●

Dirjen Migas Tutuka Rapat Perdana dengan DPR

Dirjen Migas Tutuka Ariadji menghadiri rapat perdana dengan Komisi VII DPR, Senin (16/11). Dalam kesempatan tersebut, Tutuka memaparkan kebijakan *upstream*, *midstream*, dan *downstream* sektor migas.

Cadangan migas nasional, Tutuka menjelaskan, perlu terus ditingkatkan dengan menambah angka *Proven* dan meningkatkan umur cadangan migas. Pada tahun 2020, umur cadangan minyak adalah 9,4 tahun dan gas bumi adalah 17,7 tahun.

Peningkatan cadangan migas diarahkan dengan memanfaatkan potensi besar dari 128 cekungan sedimen yang ada dengan 68 di antaranya belum dieksplorasi. Terdapat 20 cekungan berproduksi, 27 cekungan dibor dengan penemuan, 13 cekungan dibor tanpa penemuan dan 68 cekungan yang belum dieksplorasi.

Sementara itu, peningkatan produksi migas dilakukan dengan beberapa program rutin dan terobosan, yaitu program *work routine*, seperti *infill drilling/step out* pada lapangan eksisting dan *work over/well service*. Selain itu, dilakukan pula percepatan transformasi *resources* menjadi produksi, dengan mempercepat POD baru dan POD *pending*, melakukan *commercial exercise* dengan *split adjustment*, *tax incentive*, dan *investment credit*.

“Program peningkatan produksi juga dilakukan dengan penggunaan *Enhanced Oil Recovery* (EOR), seperti *chemical EOR*, *CO₂ Injection*, dan *steamflood*,” jelasnya.

Kemudian, pengelolaan energi diarahkan menuju peningkatan akses energi secara merata dengan harga terjangkau dan tata kelola penyediaan energi yang lebih efisien. Untuk mendukung hal tersebut, penyediaan gas bumi harus diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan domestik dan mengurangi ekspor secara bertahap.

“Gas bumi tidak lagi dianggap sebagai komoditas ekspor semata tetapi sebagai modal pembangunan nasional. Penggunaan gas bumi

domestik diprioritaskan untuk transportasi, rumah tangga dan pelanggan kecil, *lifting* minyak, industri pupuk, industri berbasis gas bumi, pembangkit listrik, dan industri berbahan bakar gas,” ungkapnya.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Salah satunya adalah Komisi VII DPR mendesak Dirjen Migas untuk fokus melakukan eksplorasi lapangan minyak baru. Selain itu, Komisi VII DPR meminta Dirjen Migas untuk membenahi kebijakan serta tata niaga hulu dan hilir migas melalui penataan peraturan perundang-undangan termasuk revisi UU Migas.

Dirjen Migas juga diminta untuk menyusun *roadmap* penggunaan gas bumi produksi dalam negeri dan impor tambahan sebagai prioritas pemenuhan kebutuhan pembangkit listrik, industri pupuk dan industri lainnya.

Untuk mengurangi impor LPG, Dirjen Migas dan Dirjen EBTKE didorong untuk memanfaatkan batubara menjadi gas *dimethyl ether* (DME) sebagai pengganti LPG dalam rangka pengurangan LPG. ●





Dirjen Migas Tutuka Bersilaturahmi dengan Pegawai

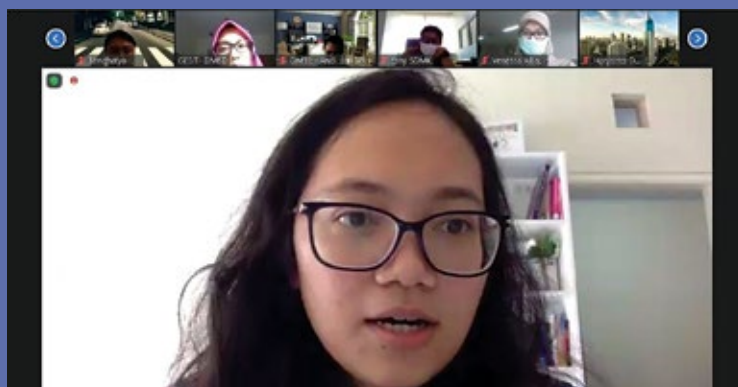
Dirjen Migas Tutuka Ariadji bersilaturahmi secara virtual dengan para pegawai di lingkungan Ditjen Migas, Selasa (17/11). Selain silaturahmi, pertemuan yang berlangsung sepekan setelah Tutuka dilantik ini bertujuan meningkatkan solidaritas antara pimpinan dan pegawai Ditjen Migas.

Dalam pertemuan tersebut, Tutuka menyatakan kegembiraannya dapat bertatap muka secara virtual dengan pegawai. Ia juga bersyukur atas dukungan dari para pejabat eselon II yang banyak membantunya di awal masa bertugas ini.

“Selama seminggu ini dengan para direktur yang sangat kooperatif, saya sudah belajar banyak. Saya berharap, semoga kita semua bisa bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik,” ujar ayah empat anak yang hobi lari itu.

Dalam kesempatan itu, Tutuka juga menceritakan pengalaman pertamanya melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR.

“Atas bantuan rekan-rekan, rapat berjalan lancar dan menjadi bekal bagi hubungan yang lebih baik di



masa depan. Namun yang tak kalah penting adalah bagaimana kita melaksanakan hasil rapat kemarin,” tambahnya.

Tutuka juga mengingatkan agar para pegawai Ditjen Migas tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Seperti tidur yang cukup, berolah raga secara teratur serta tetap meluangkan waktu bagi keluarga.

“Tetap harus ada waktu untuk olahraga dan keluarga. Saya juga kurang senang sebetulnya kalau kerja sampai larut (malam) begitu. Nanti kurang seimbang. Kadang-kadang hasilnya (kerja lembur) cuma beda sedikit atau bahkan kurang dari mereka yang bekerja secara

konsisten. Kalau digenjot nanti suatu saat malah drop,” katanya.

Dalam sesi tanya jawab, secara umum para pegawai Ditjen Migas mengucapkan selamat atas pelantikan Tutuka Ariadji sebagai Dirjen Migas dan siap membantu pelaksanaan tugasnya untuk kesuksesan masa depan Ditjen Migas.

“Motivasi teman-teman di Ditjen Migas luar biasa. Siapapun yang diperintahkan, tidak akan ragu untuk bekerja. Intinya kami siap mendukung Bapak dan mohon kiranya dimanfaatkan inovasi-inovasi yang ada di kawan-kawan, termasuk generasi milenial,” kata Mirza Mahendra dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas. ●

Bahas PI 10%, Dirjen Migas Terima Kunjungan DPRD Muba

Dirjen Migas Tutuka Ariadji menerima kunjungan Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) di Gedung Ibnu Sutowo, Rabu (25/11). Kunjungan Pansus IV DPRD Muba ini bertujuan berkonsultasi terkait *Participating Interest* (PI) 10% bagi daerahnya, termasuk juga pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) akan mengelola blok migas.

Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Sugondo, dalam pertemuan tersebut menyampaikan, saat ini pihaknya tengah mengawal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa eksekutif terkait pembentukan BUMD PT Muba Maju Berjaya (Perseroda) sebagai penerima PI 10%.

“Nantinya BUMD ini akan membentuk anak perusahaan untuk mengelola PI 10%,” katanya.

Dirjen Migas Tutuka Ariadji menyambut baik kunjungan tersebut dan mengharapkan agar Pemda Muba dapat memanfaatkan PI 10% untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PI 10% sendiri adalah besaran maksimal 10% *participating interest* pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh KKKS kepada BUMD atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Aturan mengenai PI 10% ini tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan-Ketentuan Penawaran *Participating Interest* Sepuluh Persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

PI 10% bertujuan untuk meningkatkan peran serta daerah dan nasional dalam pengelolaan migas. PI 10% dapat dilaksanakan BUMD dengan ketentuan kepemilikan saham BUMD dan PI

10% tidak dapat diperjualbelikan/dialihkan/dijaminkan sehingga hasil produksi migas seluruhnya dapat dinikmati oleh masyarakat daerah penghasil migas.

BUMD disahkan melalui Perda dan berbentuk Perusda (100% Pemda) atau Perseroan Terbatas (minimal 99% Pemda dan sisanya terafiliasi dengan Pemda). BUMD hanya sebagai pengelola PI 10% dan tidak boleh melakukan kegiatan usaha lain.

Mekanisme lain yang dapat digunakan adalah Provinsi dan Kabupaten membentuk anak perusahaan BUMD sebagai pengelola PI 10%, dengan ketentuan dasar kewenangan pembentukan tercantum dalam Perda. BUMD dapat melakukan kegiatan usaha lain selain pengelolaan PI 10%. ●





Dirjen Migas Serahkan DIPA kepada Sesditjen Migas

Dirjen Migas Tutuka Ariadiji ketika menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun 2021 kepada Sesditjen Migas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ditjen Migas di Auditorium Gedung Ibnu Sutowo, Jumat (27/11). Hadir pula dalam kesempatan itu, para Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) di lingkungan Ditjen Migas.

Dalam penyerahan tersebut, Dirjen Migas menekankan pentingnya pelaksanaan anggaran yang mengedepankan akuntabilitas, integritas, serta transparansi. Di samping itu, perlu dibangun sistem yang baik agar pelaksanaan pekerjaan dapat lebih mudah.

“Kita harus dapat memperbaiki kekurangan pelaksanaan anggaran. Tetap jaga integritas, akuntabilitas, serta transparansi,” tegasnya.

Tutuka melanjutkan, ketaatan pada aturan merupakan hal prinsip yang harus dilakukan. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan berhadapan dengan hal-hal yang berisiko, Tutuka meminta tidak perlu ragu untuk menolak atau menjauh.

“Hal-hal yang sekiranya berbahaya, *stay away!* Karena begitu kita mendekat, ada sesuatu risiko (yang



harus ditanggung). Lebih baik menjauh saja,” tambahnya.

Sesuai arahan Menteri ESDM agar pelaksanaan, serapan anggaran tahun 2021 dapat terdistribusi lebih merata sepanjang tahun. Dirjen Migas meminta agar pelaksanaan tender-tender dapat dilakukan lebih awal sehingga realisasinya tidak menumpuk di akhir tahun.

“Untuk meningkatkan penyerapan, (pekerjaan) agar dilakukan di awal sehingga kita tidak repot di belakang (akhir tahun). Saya tahu ini berhubungan dengan pihak-pihak di luar migas dan tugas saya mengomunikasikan dengan pihak-pihak tersebut sehingga penanggung jawab anggaran dapat bekerja lebih nyaman,” kata Tutuka.

Dalam kesempatan itu, Tutuka juga mengingatkan pentingnya

keseimbangan dalam bekerja, beribadah dan keluarga. Kerja sama dengan tim, diyakini akan membuat pelaksanaan pekerjaan lebih mudah.

“Biar bagaimanapun, keseimbangan bekerja, beribadah dan meluangkan waktu dengan keluarga itu penting. Tidak bisa 100% bekerja saja,” ujarnya.

Untuk tahun 2021, Kementerian ESDM mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp7 triliun. Alokasi anggaran tersebut didistribusikan kepada 12 unit organisasi dan 32 satuan kerja (satker). Alokasi anggaran itu tertuang dalam 12 DIPA Induk yang mencerminkan masing-masing unit organisasi dan 32 DIPA Petikan. Alokasi anggaran tahun 2021 ini mengalami kenaikan Rp0,8 triliun dibandingkan pagu anggaran belanja tahun 2020 yang sebesar Rp6,2 triliun. Khusus Ditjen Migas, alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp2,052 triliun. ●



Tahun 2021, Pemerintah Targetkan Bangun Jargas 120.776 SR

Pemerintah menargetkan membangun jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas) sebanyak 120.776 sambungan rumah (SR) pada tahun 2021. Sebanyak 120.776 SR tersebut tersebar di 21 kabupaten/kota.

Sebagian besar jargas yang akan dibangun ini berlokasi di Jawa Timur dan Jawa Barat. Lokasi pembangunan jargas di Jawa Timur adalah Kabupaten Bojonegoro (10.000 SR), Kabupaten Lamongan (5.935 SR), Kota Surabaya (6.088 SR), Kabupaten Sidoarjo (11.418 SR), Kota Mojokerto (5.699 SR), Kabupaten Mojokerto (5.935 SR), Kabupaten Jombang (6.137 SR), Kabupaten Pasuruan (5.750 SR), Kota Pasuruan (7.003 SR), Kabupaten Probolinggo (5.737 SR), dan Kota Probolinggo (5.080 SR).

Untuk Jawa Barat, lokasi pembangunan jargas adalah Kabupaten Karawang (3.053 SR), Kabupaten Subang (5.488 SR), Kota Cirebon (4.515 SR), dan Kabupaten Cirebon (3.758 SR). Daerah-daerah lain yang dibangun jargas adalah Kabupaten Aceh Utara (3.510 SR), Kota Lhokseumawe (3.000 SR), Kabupaten Aceh Timur (5.016 SR), Kabupaten Banyuasin (6.889 SR), Kabupaten Banggai (5.005 SR), dan Kabupaten Wajo (5.750 SR).

Untuk mendukung kelancaran pembangunan jargas tahun depan,

Ditjen Migas menyelenggarakan *Focus Group Discussion (FGD)* Rencana Pembangunan Jargas di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat Tahun 2021 bertempat di Harris Hotel, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (3/12).

Penyelenggaraan FGD ini, menurut Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso, untuk memastikan komitmen pemerintah daerah (pemda) mendukung pelaksanaan pembangunan jargas tahun 2021.

Rencana pembangunan jargas tahun 2021 mendapat sambutan positif dari berbagai pemerintah daerah. Salah satunya Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jargas berjalan lancar, Pemkab Jombang akan turun langsung ke lapangan.

“Pemerintah Kabupaten Jombang akan *all out*. Kita akan membantu sepenuhnya. Bukan sekedar kolaborasi, tapi turun langsung ke lapangan untuk mewujudkan ini,” tegas Wakil Bupati Jombang Sumrambah dalam FGD Rencana Pembangunan Jargas di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat Tahun 2021.

Pemkab mendukung pembangunan jargas karena bermanfaat bagi masyarakat yaitu lebih murah, praktis, bersih dan ramah lingkungan.

Pembangunan jargas juga dilakukan untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Jargas yang rencananya akan dibangun tahun 2021 seharusnya dibangun pada 2020. Namun, anggarannya direalokasi untuk penanganan Covid-19 sehingga ditunda menjadi tahun 2021. Meski begitu, bukan berarti tahun 2020 nihil pembangunan jargas.

Pembangunan jargas tetap berlangsung pada tahun 2020 di sejumlah wilayah. Salah satunya adalah Lamongan, Jawa Timur. Dirjen Migas Tutuka Ariadi meresmikan 4.000 SR jargas di salah satu kabupaten di Jawa Timur pada Jumat (18/12).

Menurut Tutuka, ketersediaan gas di Indonesia sangat besar sehingga penting untuk dimanfaatkan.

“Ketersediaan gas di Indonesia berlebih untuk kebutuhan dalam negeri. Pemerintah terus mengupayakan penggunaan gas ini untuk kebutuhan domestik dan mengurangi impor,” ungkap Dirjen Migas.

Secara keseluruhan, untuk tahun 2020, dari target awal 127.864 SR, realisasi pembangunan jargas mencapai 135.286 SR di 23 kabupaten/kota. Penambahan sebanyak hampir 6% ini karena adanya permintaan dari pemda. ●



Penghujung Tahun 2020, Ditjen Migas Tingkatkan Fasilitas dan Bagikan *Medical Kit*

Ditjen Migas meresmikan fasilitas baru dan kembali membagikan *medical kit* bagi para pegawai di lingkungan Ditjen Migas pada penghujung tahun 2020. Sesditjen Migas Iwan Prasetya Adhi memimpin peresmian fasilitas baru dan pembagian *medical kit* tersebut di lobi Gedung Ibnu Sutowo, Rabu (20/12). Turut hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Migas, pejabat fungsional madya, dan para pegawai lainnya.

Peningkatan fasilitas Gedung Ibnu Sutowo secara bertahap dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada *stakeholder* migas. “Sejak tahun 2017, seluruh fasilitas Gedung Ibnu Sutowo secara bertahap diperbaiki agar dari waktu ke waktu pelayanan di tempat kami semakin baik,” kata Iwan.

Dengan adanya tampilan *all new look* Gedung Ibnu Sutowo dan semakin membaiknya dukungan sarana prasarana dan infrastruktur gedung, juga diharapkan dapat menjadi *good influence* dan meningkatkan imun seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Migas.

Dalam kesempatan tersebut, Iwan juga menyampaikan apresiasinya atas

pencapaian realisasi anggaran Ditjen Migas tahun 2020 sebesar 96,68, melebihi target 94,5%. Ini berarti tiga tahun berturut-turut Ditjen Migas mampu mencapai realisasi anggaran di atas 95%.

Sementara itu, untuk meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*, telah dilakukan penyederhanaan perizinan dan regulasi dengan menggunakan aplikasi yang terintegrasi di seluruh lingkungan Kementerian ESDM.

Rangkaian acara peresmian ini juga diisi dengan pemberian bantuan dari Keluarga Besar Ditjen Migas kepada Keluarga Alm. Ilham Rakhman Hakim yang meninggal dunia tanggal 20 Desember 2020.

Selain itu, diserahkan pula paket *medical kit* tahap VI. Isi paket yang dibagikan ini disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga. Paket

medical kit kelima ini terdiri dari susu, madu, vitamin, masker, *hand sanitizer* dan sebagainya.

Pembagian *medical kit* telah dilakukan Ditjen Migas sejak Maret 2020. *Medical kit* tidak hanya dibagikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga tenaga penunjang yang bekerja di lingkungan Ditjen Migas.

Ditjen Migas juga melakukan *monitoring* kesehatan para pegawai secara ketat dan diharapkan berdisiplin menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari.

“Jangan lupa melaksanakan protokol kesehatan di manapun kita berada,” pesan Iwan.

Selain itu, untuk mencegah penyebaran Covid-19, Ditjen Migas juga menggelar *swab test* masal secara berkala. ●



Dirjen Migas Lantik 63 Pejabat Fungsional Ditjen Migas



Dirjen Migas Tutuka Ariadji melantik dan mengambil sumpah 63 Pejabat Fungsional di lingkungan Ditjen Migas bertempat di

Auditorium Ditjen Migas, Selasa (15/12). Pelantikan seluruh Pejabat Fungsional ini sesuai arahan Presiden RI terkait penyederhanaan organisasi dua level eselon dan peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Menpan RB Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kemenpan RB.

Pada kesempatan sama, dilantik pula sembilan Pejabat Fungsional yang

lulus jabatan *inpassing* dan Pejabat Fungsional yang naik jenjang jabatan. Hasil transformasi jabatan tersebut, untuk pejabat yang sebelumnya sebagai Pejabat Administrator atau eselon III, dilantik menjadi Pejabat Fungsional Ahli Madya. Sedangkan untuk Pejabat Pengawas atau eselon IV, dilantik menjadi Pejabat Fungsional Ahli Muda.

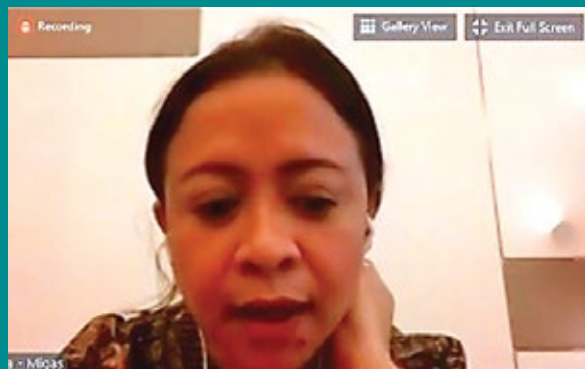
Pada pelantikan yang berlangsung secara fisik dan *online* karena pandemi Covid-19 ini, Dirjen Migas Tutuka Ariadji meminta agar seluruh pejabat yang dilantik untuk meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan inovasi bagi Ditjen Migas.

“Sebagai ASN di Kementerian ESDM, janganlah terpaku dalam rutinitas (*business as usual*). Kembangkanlah daya inovasi,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Dirjen Migas juga menyerahkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya yang diterima secara simbolis oleh Direktur Pembinaan Program Migas Soerjaningsih dan dua pegawai lainnya. ●



Kali Ke-10, Ditjen Migas Adakan Sosialisasi Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi



Ditjen Migas, melalui Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas, menyelenggarakan Sosialisasi Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, Selasa (1/12). Sosialisasi yang telah kali ke-10 diadakan ini diadakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan telah diterapkannya penggunaan aplikasi sistem pelayanan perizinan terintegrasi pada perizinan.esdm.go.id.

Pada sosialisasi yang berlangsung secara virtual ini turut mengundang badan usaha yang mengangkut komoditas Gas Bumi, LPG, LNG, dan/ atau CNG yang merupakan mata rantai pengelolaan gas bumi.

“Badan usaha gas bumi memiliki peran yang penting menjaga

ketahanan dan kemandirian energi kita,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih ketika membuka acara tersebut.

Menurut Soerja, Pemerintah akan terus meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi melalui pasokan gas bumi dan pengembangan infrastruktur, serta menjaga iklim investasi.

Khusus pengembangan infrastruktur gas bumi, saat ini terdapat tiga ruas yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu ruas transmisi Cirebon-Semarang (Cisem), ruas Kek Sei Mangke-Dumai dan ruas WNTS-Pemping.

“Kalau nanti semua terhubung pipa dari Aceh sampai ke Jawa Timur, diharapkan kehandalan operasi dan pasokan gas bumi di Sumatera dan Jawa dapat terwujud,” ungkapnya.

Untuk pulau-pulau yang tidak dapat terhubung dengan jalur pipa, Pemerintah akan mendorong pembangunan terminal mini LNG dengan moda transportasi truk untuk wilayah terpencil. Upaya lainnya untuk mendukung keandalan pasokan gas, Pemerintah mengembangkan regasifikasi batubara. Proyek hilirisasi ini akan menghasilkan *dimethyl ether* atau DME sebagai bahan bakar alternatif pengganti LPG. ●



Hampir 33 Tahun Mengabdi, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Masuki Purna Bhakti

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Adhi Wibowo memasuki purna bhakti terhitung 1 Desember 2020. Adhi Wibowo termasuk sosok yang penuh pengabdian mengingat ia hampir 33 tahun mengabdikan diri sebagai aparatur sipil negara (ASN) Kementerian ESDM.

Sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdian Adhi Wibowo, Ditjen Migas menggelar pelepasan di Ruang Auditorium Gedung Ibnu Sutowo, Senin (30/11). Hadir dalam kesempatan ini, Dirjen Migas Tutuka Ariadji, mantan Dirjen Migas yang kini menjabat sebagai Sekjen DEN Djoko Siswanto, dan para pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Migas. Acara pelepasan ini juga dihadiri oleh para pegawai secara virtual.

Dirjen Migas Tutuka Ariadji dalam pertemuan tersebut mengucapkan terima kasih atas kerja keras yang dilakukan Adhi Wibowo selama mengabdikan sebagai ASN Kementerian ESDM. Dia mengharapkan agar ilmu dan teladan yang diberikan Adhi dapat berguna bagi generasi penerusnya.

“Prestasi dan pengorbanan Pak Adhi tidak terlepas dari dukungan keluarga. Semoga kita dapat menarik pelajaran dari Pak Adhi,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan SK Pensiun dari Sesditjen Migas Iwan Prasetya Adhi kepada Adhi Wibowo serta kenang-kenangan dari Ditjen Migas. Sebaliknya, Adhi menyerahkan Memori Jabatan.

Mengawali sambutannya pada acara pelepasan ini, Adhi yang merupakan kelahiran Yogyakarta 60 tahun silam tersebut, bersyukur masih diberikan kesehatan dan berpesan agar semua pegawai Ditjen Migas menjaga kesehatannya.

“Banyak yang tahu rutin menjaga kesehatan itu penting. Tapi, susah sekali (melakukannya). Tolong dijaga kesehatannya, olahraga yang rutin,” pesan Adhi.

Hal yang membanggakan Adhi selama menjabat sebagai Direktur Teknik dan Lingkungan Migas antara lain pencapaian Direktorat Teknik dan

Lingkungan Migas meraih wilayah bebas korupsi (WBK). Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 132.K/O8/MEM/2020 tentang Unit Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif tanggal 30 Juni 2020.

Selama dua tahun lebih menjabat sebagai Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, menurut Adhi sangat berkesan. Ia memohon maaf atas segala kesalahan dan tetap bersedia membagi pengalaman dan pemikirannya untuk mendukung Ditjen Migas.

Adhi di mata stafnya, seperti diungkapkan Rina Shanti Sijabat adalah sosok yang rendah hati dan mengayomi.

“Tidak segan melebur ke bawah. Sering menceritakan pengalamannya, baik yang enak maupun tidak enak dengan tujuan menjadi pembelajaran bagi kami,” ucap Shanti. ●

Jelang Libur Tahun Baru 2021, Menteri Arifin Tinjau Kesiapan Pasokan Energi ke TBBM Tanjung Gerem



Menteri ESDM Arifin Tasrif meninjau kesiapan pasokan energi ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tanjung Gerem di Cilegon, Provinsi Banten, Rabu (30/12). Turut didampingi oleh Dirjen Migas Tutuka Ariadji, kunjungan kerja Menteri ESDM ini guna memastikan keandalan pasokan BBM menjelang pergantian tahun 2021.

Dalam kunjungan kerja tersebut, terungkap bahwa pasokan BBM seluruh jenis cukup untuk 27 hari. Padahal, pada waktu normal, biasanya ketersediaan pasokan BBM hanya 20 hari. Oleh sebab itu, Arifin Tasrif mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dalam menyediakan ketersediaan BBM untuk masyarakat, termasuk digitalisasi 5.518 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan digitalisasi ini, dapat diketahui lokasi-lokasi yang pasokan BBM-nya kritis, serta meningkatkan efisiensi dalam penyaluran BBM.

“Digitalisasi ini akan meningkatkan efisiensi, mengurangi kesibukan kita

karena sudah diberikan informasi lebih awal dari sistem yang kita pasang. Selama ini, kegiatan dilakukan secara manual, banyak komunikasi yang tidak cepat. Dengan elektronik ini, cepat sekali prosesnya,” kata Arifin.

Arifin mengharapkan modernisasi sistem di Pertamina tidak hanya dilakukan di sektor ritel, tetapi juga sektor lainnya sehingga dapat meningkatkan efisiensi.

“*Competitiveness* harus kita perbaiki agar bisa lebih memiliki daya saing ke depan. Menjadi *world class company* itu tidak hanya memerlukan *competitiveness*, juga pelayanan (yang baik),” ia melanjutkan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Arifin mengucapkan selamat bekerja untuk seluruh pekerja Pertamina, terutama yang berada di pelosok tanah air dan meminta agar tetap mengedepankan protokol kesehatan.

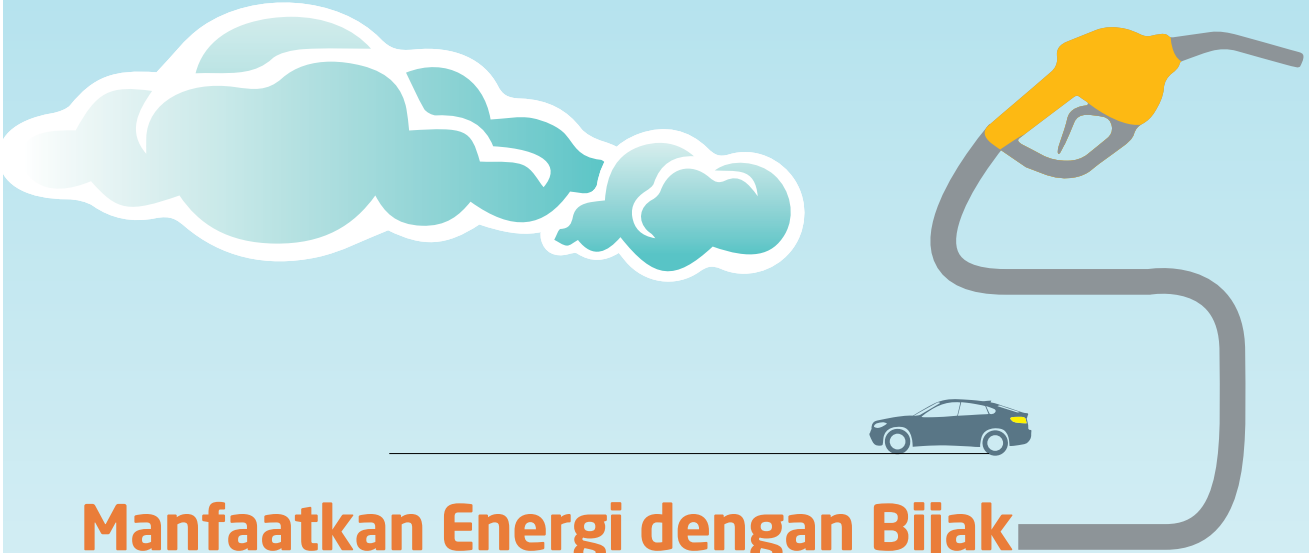
“Saya ucapkan selamat bekerja. Jangan lupakan protokol kesehatan dengan baik karena dengan kondisi kesehatan baik, kita bisa bekerja

dengan baik dan memberikan pelayanan yang maksimal,” pesannya.

Untuk memastikan ketersediaan BBM dan LPG, Pertamina telah menyiapkan beberapa tambahan fasilitas di jalur rawan kemacetan dan juga jalur menuju daerah wisata. Fasilitas tersebut antara lain 919 SPBU Siaga, 62 SPBU Tol Siaga, 213 unit Motoris atau layanan Pertamina *Delivery Service* (PDS), Mobil Tanki *standby* sebanyak 160 unit, mobile dispenser 3 unit, Pertashop 32 Unit, layanan pembayaran tunai dan non tunai di seluruh SPBU, 4.240 Agen LPG Siaga, dan 66.951 Pangkalan LPG Siaga.

Untuk memenuhi fasilitas reguler dan tambahan tersebut, Pertamina juga telah menyiagakan seluruh Terminal Bahan Bakar dan LPG, termasuk FT Tanjung Gerem yang merupakan salah satu titik suplai terpenting untuk wilayah Merak, kawasan wisata Anyer, dan Banten secara keseluruhan. Terlebih wilayah Jawa Bagian Barat termasuk salah satu konsentrasi terbesar untuk daerah tujuan wisata dan daerah rawan kemacetan. ●

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
GEDUNG IBNU SUTOWO
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B 5, Jakarta 12910, Telp. (021) 526 8910, Fax. (021) 526 8980



Manfaatkan Energi dengan Bijak

Guna Mewujudkan Ketahanan Energi Untuk Negeri

Terutama energi fosil yang tidak dapat diperbaharui...
Agar masih dapat dirasakan anak cucu kita nanti...



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

GEDUNG IBNU SUTOWO

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B 5, Jakarta 12910

Telp. (021) 526 8910, Fax. (021) 526 8980

www.migas.esdm.go.id



www.migas.esdm.go.id



@halomigas



Halo Migas Ditjen Migas



@halomigas



Halo Migas Ditjen Migas

